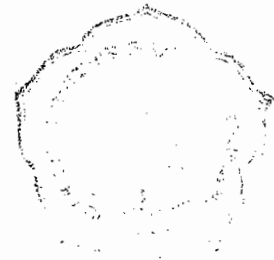


**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN
FINANSIAL PERUSAHAAN SEBELUM DAN DI SAAT
KRISIS EKONOMI**

**STUDI KASUS PADA PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

OK. FREDY JARWANTO

NIM : 962114087

NIRM : 960051121303120081

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2002

S k r i p s i

**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL
PERUSAHAAN SEBELUM DAN DI SAAT KRISIS EKONOMI
STUDI KASUS PADA PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
PALEMBANG**

Oleh:

Ok. Fredy Jarwanto

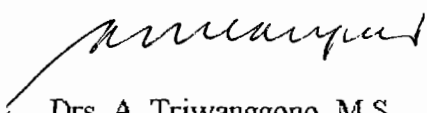
NIM : 96.2114.087

NIRM : 96.0051121303120.081

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal: 18 - Mei - 2002



Drs. A. Triwanggono, M.S

Pembimbing II

Tanggal: 27 - Mei - 2002



Drs. Titus Odong K, M.A

Skripsi
**ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN
FINANSIAL PERUSAHAAN SEBELUM DAN DI SAAT
KRISIS EKONOMI**
STUDI KASUS PADA PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
PALEMBANG

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

OK. Fredy Jarwanto

NIM : 962114087

NIRM : 960051121303120081

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 28 Agustus 2002

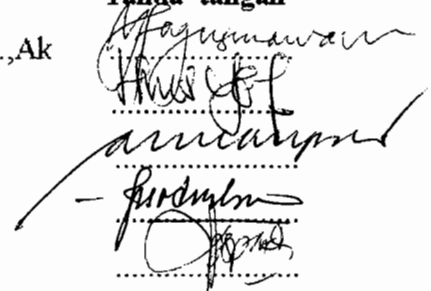
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama lengkap

Ketua	Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M., Ak
Sekretaris	Ir. Drs. Hansiadi Yuli H., M. Si., Ak
Anggota	Drs. A. Triwanggono, M.S
Anggota	Drs. Titus Odong K, M.A
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak

Tanda tangan

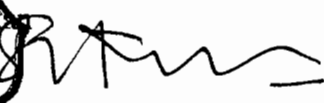


Yogyakarta, 31 Agustus 2002

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Hg. Suseno TW., M.S

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **GURU YANG BAIK ADALAH PENGALAMAN HIDUP.**
- **TAK ADA YANG JATUH DARI LANGIT DENGAN CUMA-CUMA,
SEMUA BERKAT USAHA DAN DOA.**
- **KEGAGALAN ADALAH AWAL DARI KESUKSESAN.**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN:

- Bapak dan Ibu tercinta.
- Kakakku H. Wawan Agus Santoso dan
A. Andri Yulianto serta adikku Fr. Ony
Pujiastuti.
- Christina S.W dan keluarga.
- Teman-teman Akt'96

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,

Penulis



Ok. Fredy Jarwanto

ABSTRAK

ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL PERUSAHAAN SEBELUM DAN DI SAAT KRISIS EKONOMI

**Studi kasus pada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II
Cabang Palembang**

**Ok. Fredy Jarwanto
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2002**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perbedaan tingkat kesehatan finansial perusahaan sebelum dan di saat krisis ekonomi, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ada atau tidaknya perbedaan tingkat kesehatan finansial perusahaan sebelum dan di saat krisis ekonomi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan finansial ini dilakukan analisis data yang terdiri dari dua tahap. Pada tahap pertama: dilakukan analisis dari berbagai rasio keuangan berdasarkan SK. Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998. Adapun laporan keuangan yang akan dianalisis adalah laporan keuangan pada tahun 1995 dan 1996 (untuk sebelum krisis ekonomi) dan laporan keuangan pada tahun 1998 dan 1999 (untuk di saat krisis ekonomi). Sedangkan tahap kedua: hasil analisis tahap pertama di rata-rata, kemudian hasil rata-rata ini dicocokkan dengan skor yang ada dalam SK. Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998. Sedangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kesehatan finansial sebelum krisis maupun di saat krisis ekonomi dengan cara menelusuri berbagai kebijakan yang diambil selama krisis ekonomi dengan kinerja perusahaan.

Berdasarkan analisis data keuangan PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang ditemukan kesimpulan (1) bahwa terjadi perbedaan tingkat kesehatan finansial perusahaan di saat krisis ekonomi bila dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi, dalam hal ini tingkat kinerja PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang di saat krisis ekonomi lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi. (2) faktor-faktor yang menyebabkan lebih baiknya tingkat kesehatan finansial perusahaan di saat krisis ekonomi, yaitu: peningkatan tingkat imbalan kepada pemegang saham (ROE), peningkatan tingkat imbalan investasi (ROI) dan stabilnya keenam indikator kesehatan finansial lainnya.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF COMPANY'S FINANCIAL SOUNDNESS LEVEL DIFFERENCE BEFORE AND WITHIN ECONOMIC CRISIS

**A case study at PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II
Palembang Branch**

**Ok. Fredy Jarwanto
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2002**

This study aimed:(1) to find out the company's financial soundness level difference before and within economic crisis.(2) to identify the factor causing the existence and the absence of company's financial soundness level difference before and within economic crisis. The study was a case study at PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II, Palembang Branch.

The data collecting techniques used in this study were interview, observation, and documentation. To find out the financial soundness level difference, the research carried out a data analysis comprising two stages. First, carrying out an analysis from various financial ratios based on the Decree of Finance Minister No. 198/KMK.016/1998. The financial report, which would be analyzed, was the financial report in the years of 1995 and 1996 (before the economic crisis), and financial report in the years of 1998 and 1999 (within the economic crisis). While, the second stage, the result of the first stage analysis was measured to obtain the mean. Then, the means was compared to the score existing in the Decree of finance Minister No. 198/KMK.016/1998. While, to identify the factors causing the difference of financial soundness level before and within economic crisis, the study tracked many policies taken during the economic crisis with company's performance.

Based on the financial data analysis of PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II, Palembang Branch, it was found that (1) there was difference level of company financial soundness within economic crisis if it was compared to the period before the economic crisis.The financial soundness level of the company during the economic crisis was much better than before the crisis.(2) the factors that made it better were: the increase of return on exchange (ROE),the increase of return on investment (ROI),and the stability of the other six financial soundness indicators.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa di surga yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Finansial Perusahaan Sebelum dan Di Saat Krisis Ekonomi”** di PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

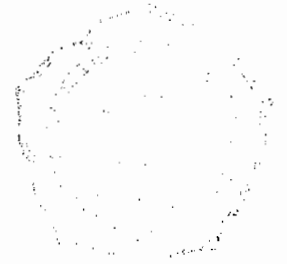
1. Rektor Universitas Sanata Dharma beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan kelonggaran dalam menyelesaikan perkuliahan di kampus tercinta ini.
2. Drs. Hg. Suseno TW, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
3. FR. Reni Retno Anggraini, S.E, M.Si, Akt, selaku ketua jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
4. Bapak Drs. A. Triwanggono, M.S, selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan penuh perhatian membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan bagi penulis, hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Titus Odong K, M.A, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis, hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Istanto Yuli Prabowo, selaku Manager Keuangan dan keluarga besar PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.
7. Bapak Ignatius Wagiman dan Ibu M. Iswati, selaku orang tua penulis yang dengan penuh kasih sayang membantu penulis dalam doa dan yang telah bersusah payah membiayai kuliah penulis serta kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat.
8. Chris yang selalu menemani penulis selama kuliah dan yang selalu memberikan perhatian, kesabaran serta semangat kepada penulis.
9. Semua teman-teman akuntansi '96 yang selalu membantu penulis selama kuliah.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat terbuka dan berterima kasih atas segala masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pembaca semuanya.

Yogyakarta, 20 April 2002

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Pembatasan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	2
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II. LANDASAN TEORI	5
A. Laporan Keuangan	5
1. Pengertian Laporan Keuangan	5

2. Tujuan Laporan Keuangan	6
3. Macam Laporan Keuangan	6
4. Pihak-pihak yang Berkepentingan	7
5. Peranan Laporan Keuangan	7
B. Analisis Laporan Keuangan	8
1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan	8
2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan	8
3. Macam Analisis Laporan Keuangan	8
4. Peranan Analisis Laporan Keuangan	9
C. Analisis Rasio Laporan Keuangan	9
1. Pengertian Analisis Rasio Laporan Keuangan	9
2. Metode Analisis Rasio Laporan Keuangan	10
3. Macam-macam Analisis Rasio Laporan Keuangan	10
D. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	18
E. Peranan BUMN	18
F. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.198/KMK.016/1998	19
G. Penyebab Krisis Ekonomi	28
H. Dampak Krisis Ekonomi	29
I. Cara Mengatasi Krisis Ekonomi	30
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	31

C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Data yang Dicari	31
E. Variabel Penelitian	32
F. Definisi Operasional	33
G. Teknik Pengumpulan Data	33
H. Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	39
A. Sejarah Singkat Perusahaan	39
B. Daerah Lingkungan Kerja Cabang Pelabuhan Palembang	41
C. Kegiatan Usaha Perusahaan	42
D. Struktur Organisasi Perusahaan	44
E. Personalia	52
F. Sumber dan Penggunaan Modal Kerja	54
G. Pemasaran	56
H. Keuangan	57
BAB V ANALISIS dan PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Data	58
B. Analisis Data dan Pembahasan	68
BAB VI PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	105
C. Keterbatasan Penelitian	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara	107
2. Pedoman Observasi	109
3. Pedoman Observasi Dokumen	110
4. Akta Notaris PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang	111
5. Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara	112
6. Surat Ijin Penelitian	116

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Neraca per 31 Desember 1995	60
Tabel 5.2 Neraca per 31 Desember 1996	61
Tabel 5.3 Neraca per 31 Desember 1998	62
Tabel 5.4 Neraca per 31 Desember 1999	63
Tabel 5.5 Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari-31 Desember 1995	64
Tabel 5.6 Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari-31 Desember 1996	65
Tabel 5.7 Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari-31 Desember 1998	66
Tabel 5.8 Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari-31 Desember 1999	67
Tabel 5.9 Perhitungan Tingkat Imbalan Pada Pemegang Saham	69
Tabel 5.10 Perhitungan Tingkat Imbalan Investasi	71
Tabel 5.11 Perhitungan Tingkat Rasio Kas	73
Tabel 5.12 Daftar Tingkat Rasio Lancar	75
Tabel 5.13 Daftar Tingkat Perputaran Piutang	76
Tabel 5.14 Daftar Tingkat Perputaran Persediaan	78
Tabel 5.15 Daftar Perputaran Total Aset	79
Tabel 5.16 Daftar Tingkat Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	81
Tabel 5.17 Daftar Hasil Perhitungan dari Masing-masing Indikator dan Rata-ratanya	83
Tabel 5.18 Daftar Kinerja PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang ..	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan posisi keuangan mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk melihat kesehatan finansial suatu perusahaan. Kita tidak hanya melihat dari keadaan fisik perusahaan tersebut, misalnya gedung, tanah, pembangunannya. Selain itu masih ada faktor-faktor penting lainnya yang dapat digunakan sebagai tolok ukur perkembangan perusahaan, yaitu terletak pada unsur keuangannya. Sebab dari unsur ini kita juga dapat memberikan evaluasi, apakah kebijakan yang ditempuh oleh suatu perusahaan sudah tepat atau belum?

Mengingat dalam era globalisasi ini sudah begitu kompleknya permasalahan yang dapat menyebabkan bangkrutnya suatu perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu krisis multidimensi telah menimpa masyarakat Asia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Kira-kira Juli tahun 1997 masyarakat Indonesia mulai merasakan terjadinya “krisis ekonomi.”

Hampir semua masyarakat Indonesia terkena dampak krisis ekonomi ini. Banyak sekali korban PHK yang harus merelakan pekerjaannya akibat perusahaannya mengalami kebangkrutan. Mungkin masih banyak dampak lainnya dari krisis ekonomi seperti dilikuidasinya bank-bank yang kurang sehat finansialnya.

Oleh karena itu untuk menghindari kebangkrutan, maka seorang manajer harus selalu memperhatikan dan mengadakan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan atau kesehatan finansial perusahaan dari waktu ke waktu.

Seorang manajer harus mampu memahami kondisi keuangan perusahaannya, karena pada dasarnya kondisi keuangan perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan secara keseluruhan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan dalam hal ini tingkat kesehatan suatu perusahaan adalah laporan keuangan yang disusun pada setiap akhir periode yang berisi laporan pertanggung jawaban dalam bidang keuangan atas berjalannya suatu usaha.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data finansial atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut (S. Munawir, 1998:2).

B. Perumusan Masalah

1. Apakah terjadi perbedaan tingkat kesehatan finansial perusahaan berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum dan di saat krisis ekonomi?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya perbedaan tingkat kesehatan finansial perusahaan sebelum dan di saat krisis ekonomi?

C. Pembatasan Masalah

Dengan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu perkembangan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas berdasarkan trend rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas sebelum dan di saat krisis ekonomi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan tingkat kesehatan finansial perusahaan berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum dan di saat krisis.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya perbedaan tingkat kesehatan finansial sebelum dan di saat krisis ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangan berupa pemikiran kepada perusahaan untuk merumuskan rencana-rencana yang diperlukan di masa yang akan datang dan menentukan langkah-langkah yang sebaiknya diambil demi kelangsungan hidup perusahaan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Diharapkan dapat memberikan tambahan bacaan ilmiah bagi Universitas Sanata Dharma khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

3. Bagi penulis

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan dan merupakan media untuk mempraktekkan teori-teori tersebut.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang dapat mendukung aspek-aspek yang terkait sehingga dapat menjawab permasalahan diatas dan dapat mendukung hasil yang akan dicapai nantinya.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, daerah lingkungan kerja, kegiatan usaha perusahaan, struktur organisasi perusahaan, bagian personalia.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian beserta pembahasan yang dianalisis berdasarkan teknik analisis data yang sudah ditentukan dan sesuai dengan teori-teori yang digunakan oleh penulis.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis dengan berdasar pada analisis data dan pembahasan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan (S. Munawir, 1998:2).

Laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya, kepada pihak luar perusahaan, pemilik perusahaan, pemerintah, kreditur dan pihak lainnya (Budi Raharjo, 1994:1).

Laporan keuangan adalah suatu alat dimana informasi dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang akhirnya dimasukkan dalam laporan keuangan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya (Sofyan Syafri Harahap, 1994: 117).

Jadi secara umum laporan keuangan diartikan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut akan terlihat bagaimana perkembangan perusahaan selama periode akuntansi yang bersangkutan dan bagaimana bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai:

a. Posisi Keuangan

Posisi keuangan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

b. Kinerja Perusahaan

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas serta untuk merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

c. Perubahan Posisi Keuangan

Menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan.

3. Macam Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: (S. Munawir,1998:13)

a. Neraca

Laporan yang sistematis tentang aktiva, kewajiban, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal terakhir suatu bulan atau tahun.

b. Laporan Rugi Laba

Laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun.

c. Laporan Perubahan Modal

Perubahan modal pemilik suatu perusahaan yang telah terjadi dalam suatu periode tertentu, misalnya bulan atau tahun.

4. Pihak-pihak yang Berkepentingan

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan perusahaan maupun perkembangannya, yaitu pemilik perusahaan, kreditur, investor, pemerintah tempat domisili perusahaan tersebut dan karyawan perusahaan.

Berdasarkan semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis dan menilai posisi serta potensi atau kemajuan keuangan perusahaan, faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penganalisis adalah tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan yang telah dicapai oleh perusahaan.

5. Peranan Laporan Keuangan

Peranan laporan keuangan dalam dunia bisnis atau ekonomi dapat digunakan sebagai:

- a. Alat untuk menganalisis.
- b. Laporan pertanggung jawaban manajemen.
- c. Tanda-tanda peringatan bagi perusahaan.
- d. Untuk meramalkan atau memprediksi keuntungan suatu perusahaan.
- e. Ukuran dalam akuntansi.

B. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memilih alternatif investasi atau merger, mengetahui kondisi dan kinerja keuangan di masa depan dan sebagai proses evaluasi terhadap masalah-masalah manajemen.

3. Macam Analisis Laporan Keuangan

a. Analisis Likuiditas

Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo.

b. Analisis Pengungkit

Mengukur sampai seberapa jauh pembelanjaan dengan hutang akan menaikkan laba pemegang saham.

c. Analisis Aktivitas

Mengukur efektivitas perusahaan memanfaatkan sumber-sumber dayanya.

d. Analisis Profitabilitas

Mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan seperti terlihat dari pengembalian yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi.

4. Peranan Analisis Laporan Keuangan

Peranan analisis laporan keuangan, yaitu: (Stickney, 1996:2)

- a. Untuk mengidentifikasi keadaan ekonomi dan kondisi bisnis yang terjadi.
- b. Untuk mengidentifikasi strategi perusahaan dalam memilih bisnis yang bersaing.
- c. Memahami pentingnya konsep dan prinsip laporan keuangan yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan.

C. Analisis Rasio Laporan Keuangan

1. Pengertian Analisis Rasio Laporan Keuangan

Untuk menilai kinerja dan kondisi perusahaan, penganalisis laporan keuangan memerlukan teknik analisis, salah satu teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak digunakan adalah teknik analisis rasio laporan keuangan.

Analisis rasio laporan keuangan adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan rugi laba baik secara individu atau kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut (S. Munawir, 1998:37). Mengadakan analisis dari berbagai pos-pos dalam laporan keuangan adalah suatu dasar untuk menginterpretasikan kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut penganalisis harus menyadari bahwa untuk mendapatkan gambaran baik buruknya keadaan posisi keuangan sangat diperlukan suatu alat analisis yang berupa rasio dan indeks. Dengan mengadakan analisis rasio laporan keuangan selama beberapa periode akan dapat dilihat kecenderungan keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat membantu dalam menilai prestasi keuangan suatu perusahaan di masa lalu dan di masa yang akan datang.

2. Metode Analisis Rasio Laporan Keuangan

Adapun metode analisis yang digunakan dalam analisis rasio laporan keuangan, yaitu:

a. Analisis Vertikal

Analisis Vertikal adalah suatu analisis dengan jalan membandingkan pos-pos di dalam neraca, atau laporan rugi laba secara individual maupun kombinasi dari kedua laporan tersebut pada suatu periode tertentu. Analisis vertikal ini disebut analisis statis karena mempelajari posisi dari tiap-tiap pos saja, sehingga kesimpulan yang diperoleh hanya untuk satu periode tertentu tanpa mengetahui perkembangannya.

b. Analisis Horisontal

Analisis Horisontal adalah suatu analisis dengan jalan membandingkan neraca dan data finansial selama beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya, maka analisis ini disebut juga analisis dinamis karena kesimpulan yang dapat diperoleh beberapa saat atau periode itu dapat untuk mengetahui perkembangannya.

3. Macam-macam Analisis Rasio Laporan Keuangan

Pada dasarnya rasio laporan keuangan itu banyak sekali, karena dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan penganalisis. Dilihat dari sumbernya, rasio laporan keuangan digolongkan menjadi tiga, yaitu (Bambang Riyanto, 1997:330):

a. Rasio Laporan Keuangan Neraca

Yang tergolong dalam kategori ini adalah yang semua datanya diambil dari neraca, misalnya *current ratio*, *acid test ratio*.

b. Rasio-rasio Laporan Rugi Laba

Angka-angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil dari laporan rugi laba, misalnya *gross profit margin*, *operating ratio*.

c. Rasio-rasio Antar Laporan

Rasio-rasio antar laporan adalah semua angka-angka rasio yang dalam penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya dari laporan rugi laba, misalnya tingkat perputaran persediaan (*inventory turnover*), tingkat perputaran piutang (*account receivable turnover*).

1) Rasio Likuiditas Perusahaan

Likuiditas berhubungan dengan kemampuan dari suatu perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban lancarnya yang harus segera dipenuhi (Bambang Riyanto, 1997:25).

Kemampuan membayar dari suatu perusahaan baru dapat diketahui setelah membandingkan kekuatan membayar disatu pihak dengan kewajiban-kewajiban finansial yang harus dipenuhi dilain pihak. Adapun analisis rasio likuiditasnya adalah sebagai berikut:

a) *Current ratio*

Current ratio adalah kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Perhitungannya dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Bagi perusahaan perhitungan *Current ratio* sangat berguna untuk mengetahui berapa kredit jangka pendek yang harus ditarik sehingga likuiditas perusahaan masih dapat terjaga dengan baik.

Current ratio menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety*) kreditur jangka pendek atau kemampuan perusahaan membayar utang tersebut. Akan tetapi perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi belum tentu karena proporsi atau distribusi aktiva lancar yang tidak menguntungkan.

b) *Quick Ratio*

Quick ratio dihitung dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar. Persediaan umumnya merupakan bagian dari aktiva lancar yang kurang likuid dan sering berkurang nilainya dalam kejadian likuidasi, dimana perusahaan dinyatakan berhenti beroperasi. Selain itu persediaan juga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk direalisasi sebagai uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang.

2) Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila saat itu perusahaan dilikuidasikan (Bambang Riyanto, 1997:32).

Solvabilitas perusahaan dapat diukur dengan cara:

a) Rasio Total Aktiva atas Total Hutang

Diukur dengan cara membandingkan jumlah aktiva disatu pihak dengan jumlah hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian berarti sejumlah hutang yang dimiliki perusahaan dijamin dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya.

b) Rasio Modal Sendiri atas Hutang

Diukur dengan cara membandingkan modal sendiri (*network*) dengan hutang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang.

3) Rasio Rentabilitas

Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba pada periode tertentu, atau menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva (Bambang Riyanto, 1997:35). Rasio-rasio yang digunakan untuk menghitung rentabilitas perusahaan antara lain (Bambang Riyanto, 1997:335):

a) *Gross Profit Margin*

Gross profit margin digunakan untuk menghitung berapa besar laba bruto atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengurangi penjualan netto dengan harga pokok penjualan lalu dibandingkan dengan penjualan netto.

b) *Operating Profit Margin*

Operating profit margin digunakan untuk menghitung berapa besar laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan dengan cara membandingkan antara laba operasi dengan penjualan netto periode tertentu. Laba operasi dapat dihitung dari penjualan netto dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya administrasi, biaya penjualan dan biaya umum.

c) *Operating Ratio*

Operating ratio digunakan untuk menghitung berapa besar biaya operasi yang dikeluarkan dari setiap penjualan dengan cara menjumlahkan harga pokok penjualan ditambah dengan biaya operasi, biaya penjualan dan biaya umum lalu dibandingkan dengan penjualan netto pada periode tertentu.

d) *Net profit margin*

Net profit margin digunakan untuk menghitung berapa besar keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dengan cara membandingkan keuntungan netto setelah pajak dengan penjualan netto pada periode tertentu.

e) *Net Earning Power Ratio*

Net earning power ratio atau *rate of return on investment (ROI)* dipakai untuk menghitung besarnya kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva agar menghasilkan keuntungan netto dengan cara membandingkan keuntungan netto setelah pajak dengan aktiva pada periode tertentu.

4) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dana sebagaimana digariskan oleh kebijakan-kebijakan perusahaan. Rasio ini menyangkut perbandingan yang layak harus ada, antara penjualan dan berbagai aktiva tersebut seperti, persediaan, piutang, aktiva tetap dan lain-lainnya.

Secara khusus rasio ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan perusahaan memutar aktivasinya untuk menciptakan tingkat penjualan atau penerimaan tertentu. Rasio-rasio yang digunakan adalah:

a) Perputaran Piutang (*Receivable Turnover*)

Perputaran piutang digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu periode. Perputaran piutang ini dihitung dengan membandingkan penjualan kredit dengan rata-rata piutangnya. Sedangkan rata-rata pengumpulan piutang dapat dihitung dengan menjumlahkan piutang awal periode dengan piutang akhir periode lalu dibagi dengan dua. Untuk periode lamanya pengumpulan piutang dapat dihitung dengan cara membagi hari (umumnya 360 hari) dengan perputaran piutang.

Rata-rata pengumpulan piutang menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan sejak perusahaan melakukan penjualan sampai dengan perusahaan menerima pembayaran piutang. Perputaran yang tinggi menunjukkan bahwa semakin cepat pengembalian piutang dalam bentuk kas karena lama pengembalian piutangnya lebih pendek. Dan hal ini dapat berarti pula bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah atau memang kerja bagian perkreditan yang efektif dan efisien sebaliknya bila rasio ini semakin rendah bisa berarti bahwa terjadi *over investment* dalam piutang atau kerja bagian perkreditan kurang efektif dan kurang efisien.

b) Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Perputaran persediaan pada perusahaan manufaktur yang kegiatannya menjual barang dagangan dan memproduksi mempunyai tiga macam persediaan, yaitu:

■ Perputaran Persediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong (*Raw Material Turnover*)

Raw Material Turnover adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting. Kekurangan bahan baku dan bahan penolong mengakibatkan terhentinya proses produksi. Akan tetapi terlalu besarnya persediaan bahan baku dan bahan penolong akan mengakibatkan terlalu tingginya biaya guna menyimpan bahan baku dan bahan penolong tersebut di gudang. Sehingga diperlukan suatu rasio untuk menghitung perputaran bahan baku dan bahan penolong tersebut dengan cara membandingkan biaya pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam sekali proses produksi dengan rata-rata persediaan bahan baku.

■ Perputaran Barang Dalam Proses (*Goods In Process Turnover*)

Perputaran barang dalam proses dihitung dengan cara membandingkan harga pokok produksi dengan rata-rata persediaan barang dalam proses.

■ Perputaran Barang Jadi (*Finished Goods Turnover*)

Perputaran barang jadi dihitung dengan cara membandingkan harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan barang jadi.

Ketiga macam persediaan tersebut dalam suatu periode akan mengalami perputaran yang berbeda-beda dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan tersebut.

Apabila semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana yang dibutuhkan untuk persediaan relatif kecil. Sedangkan semakin rendah tingkat perputarannya berarti semakin panjang terikatnya dana dalam persediaan. Untuk menentukan efisien atau tidaknya perputaran persediaan dapat dilihat dari data tahun sebelumnya.

c. Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turnover*)

Working Capital Turnover adalah kemampuan modal kerja yang berputar dalam siklus kas dari perusahaan. Perputaran modal kerja dihitung dengan cara membandingkan hasil dari penjualan bersih dengan aktiva lancar yang sudah dikurangi utang lancar. Panjang pendeknya perputaran modal kerja tergantung dari perputaran masing-masing komponen modal kerja, semakin panjang tingkat perputarannya maka semakin rendah *rate overnya*.

Dengan melihat data tahun-tahun sebelumnya apabila perputarannya masih rendah dan periode terikatnya modal kerja masih tinggi maka perusahaan tersebut belum efisien dalam penggunaan modalnya dan begitu pula sebaliknya.

D. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 merupakan dasar hukum bagi negara atau pemerintah untuk mengelola perusahaan yang memproduksi kebutuhan yang sangat vital bagi seluruh rakyat seperti air minum, bahan bakar, telekomunikasi dan sebagainya. Dalam usaha untuk mengelola cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pemerintah membentuk BUMN.

SK. Menteri Keuangan RI No.740/KMk.00/1989 mendefinisikan BUMN sebagai suatu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara (Pasal 1 ayat 2a). Atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN (pasal 1 ayat 2b), yaitu: (Pandji Anoraga,1995, hal.1)

1. BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
2. BUMN yang merupakan patungan antara Pemerintah dengan BUMN lainnya.
3. BUMN yang merupakan Badan Usaha patungan dengan Swasta Nasional/Asing dimana Negara memiliki saham mayoritas minimal 51%.

E. Peranan BUMN

Peranan BUMN berhubungan erat dengan tujuan BUMN, seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983, yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
 5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang dan jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu.
 6. Turut aktif memberi bimbingan pada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.
 7. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program dan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- F. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/KMK.016/1998

Pada tahun 1989 Pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan No.740/KMK.001/1989 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN, dalam keputusan tersebut perhitungan tingkat kesehatan tidak memperhatikan kegiatan usaha dari masing-masing BUMN, sehingga penilaian tersebut tidak mencerminkan tingkat kesehatan yang sesungguhnya.

Kemudian pada tahun 1992 Pemerintah kembali mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 tentang perubahan dari keputusan Menteri tahun 1989 mengenai sistem penilaian kinerja BUMN. Keputusan Menteri Keuangan tahun 1992 ini merupakan penyesuaian yang lebih mencerminkan penilaian yang didasarkan juga pada kegiatan usaha masing-masing BUMN.

Perubahan mendasar yang dapat dilihat dengan dikeluarkannya keputusan Menteri yang baru ini adalah perubahan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 dari keputusan sebelumnya yaitu tahun 1989. Pada pasal 4 penggolongan tingkat kesehatan bernilai bobot antara 90 sampai dengan 110. Keputusan yang sebelumnya yaitu mempunyai nilai bobot antara 44 sampai dengan 100.

Penentuan untuk menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan sesuai dengan pasal 4 keputusan Menteri Keuangan tahun 1992 diatas sebagai berikut:

a. Sehat Sekali

Perusahaan dapat dikatakan berada pada kondisi sehat sekali apabila nilai bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka diatas 110.

b. Sehat

Perusahaan dapat dikatakan sehat apabila nilai bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka antara 100 sampai 110.

c. Kurang Sehat

Perusahaan dikatakan kurang sehat apabila nilai bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka diatas 90 sampai dengan 100.

d. Tidak Sehat

Perusahaan dikatakan tidak sehat apabila nilai bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka dibawah atau sama dengan 90.

Nilai bobot perusahaan didasarkan atas rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas dari tahun ke tahun dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Rentabilitas dihitung dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata modal yang digunakan dalam tahun bersangkutan. Modal rata-rata yang digunakan adalah rata-rata aktiva lancar ditambah aktiva tetap netto termasuk penyertaan pada awal tahun dan akhir tahun.
- b. Likuiditas dihitung dari aktiva lancar dibagi dengan pasiva lancar.
- c. Solvabilitas dihitung dari jumlah aktiva dibagi dengan jumlah utang.
- d. Aktivitas dihitung dari penjualan dibagi dengan jumlah aktiva.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali sistem penilaian kinerja BUMN yang dapat mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan memperhatikan kaedah penilaian kesehatan perusahaan yang berlaku umum.

Oleh karena itu keluarlah SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998 sebagai pengganti SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 826/KMK.013/1992 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN maka berdasarkan SK tersebut tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi:

- a. Sehat, yang terdiri dari:
 - AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95.
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$.
 - A apabila $65 < TS \leq 80$.
- b. Kurang Sehat, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$.
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$.
 - B apabila $30 < TS \leq 40$.

c. Tidak Sehat, yang terdiri dari:

CCC apabila $20 < TS \leq 30$.

CC apabila $10 < TS \leq 20$.

C apabila $TS \leq 10$.

Sedangkan tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Dalam penilaian aspek keuangan, indikator yang dinilai serta bobot-bobotnya adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15
2. Imbalan investasi (ROI)	10
3. Rasio kas	3
4. Rasio lancar	4
5. Collection periods	4
6. Perputaran persediaan	4
7. Perputaran total asset	4
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	<u>6</u>
Total Bobot	50

Adapun fungsi penilaian daripada indikator-indikator tersebut untuk mengukur tingkat kesehatan finansial perusahaan, pada akhirnya merupakan salah satu pijakan dalam menilai kinerja perusahaan tersebut, dalam hal ini adalah BUMN.

Sedangkan skor penilaian dari masing-masing indikator di atas adalah sebagai berikut:

1. Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor
15 < ROE	15
13 < ROE ≤ 15	13,5
11 < ROE ≤ 13	12
9 < ROE ≤ 11	10,5
7,9 < ROE ≤ 9	9
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5
5,3 < ROE ≤ 6,6	6
4 < ROE ≤ 5,3	5
2,5 < ROE ≤ 4	4
1 < ROE ≤ 2,5	3
< ROE ≤ 1	1,5
ROE ≤ 0	1

Contoh perhitungan:

BUMN "A" mempunyai ROE 10%, maka sesuai daftar skor untuk indikator ROE adalah 10,5.

2. Daftar skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor
18 < ROI	10
15 < ROI ≤ 18	9
13 < ROI ≤ 15	8
12 < ROI ≤ 13	7
10,5 < ROI ≤ 12	6
9 < ROI ≤ 10,5	5
7 < ROI ≤ 9	4
5 < ROI ≤ 7	3,5

3	$< ROI \leq 5$	3
1	$< ROI \leq 3$	2,5
0	$< ROI \leq 1$	2
	$ROI \leq 0$	0

Contoh perhitungan:

BUMN "A" memiliki ROI 11%, sesuai daftar skor untuk indikator ROI adalah 6.

3. Daftar skor penilaian *cash ratio*.

<i>Cash ratio</i> = X (%)	Skor
$X \geq 35$	3
$25 \leq X \leq 35$	2,5
$15 \leq X \leq 25$	2
$10 \leq X \leq 15$	1,5
$5 \leq X \leq 10$	1
$0 \leq X \leq 5$	0

Contoh perhitungan:

BUMN "A" memiliki *cash ratio* sebesar 32%, maka sesuai daftar skor untuk indikator *cash ratio* adalah 2,5.

4. Daftar skor penilaian *current ratio*.

<i>Current ratio</i> = X (%)	Skor
$125 \leq X$	3
$110 \leq X < 125$	2,5
$100 \leq X < 110$	2
$95 \leq X < 100$	1,5
$90 \leq X < 95$	1
$X < 90$	0

Contoh perhitungan:

BUMN "A" memiliki *current ratio* sebesar 105%, maka sesuai daftar skor untuk indikator *current ratio* adalah 2.

5. Daftar skor penilaian *collection periods* (CP).

CP = X (hari)	Perbaikan = X (hari)	Skor
$X \leq 60$	$X \geq 35$	4
$60 < X \leq 90$	$30 < X \leq 35$	3,5
$90 < X \leq 120$	$25 < X \leq 30$	3
$120 < X \leq 150$	$20 < X \leq 25$	2,5
$150 < X \leq 180$	$15 < X \leq 20$	2
$180 < X \leq 210$	$10 < X \leq 15$	1,6
$210 < X \leq 240$	$6 < X \leq 10$	1,2
$240 < X \leq 270$	$3 < X \leq 6$	0,8
$270 < X \leq 300$	$1 < X \leq 3$	0,4
$300 < X$	$0 < X \leq 1$	0

Contoh perhitungan:

BUMN "A" pada tahun 1999 memiliki *collection periods* 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari, sesuai daftar skor penilaian *collection periods* maka skor tahun 1999 menurut:

- tingkat *collection periods* = 3.
- perbaikan *collection periods* (7 hari) = 1,2.

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu = 3.

6. Daftar skor penilaian perputaran persediaan (PP).

PP = X (hari)	Perbaikan (hari)	Skor
$X \leq 60$	$35 < X$	4
$60 < X \leq 90$	$30 < X \leq 35$	3,5



$90 < X \leq 120$	$25 < X \leq 30$	3
$120 < X \leq 150$	$20 < X \leq 25$	2,5
$150 < X \leq 180$	$15 < X \leq 20$	2
$180 < X \leq 210$	$10 < X \leq 15$	1,6
$210 < X \leq 240$	$6 < X \leq 10$	1,2
$240 < X \leq 270$	$3 < X \leq 6$	0,8
$270 < X \leq 300$	$1 < X \leq 3$	0,4
$300 < X$	$0 < X \leq 1$	0

Contoh perhitungan:

BUMN "A" pada tahun 1999 memiliki perputaran persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai daftar skor penilaian perputaran persediaan, maka skor tahun 1999 menurut:

- tingkat perputaran persediaan = 1,2.
- perbaikan perputaran persediaan (32 hari) = 3,5.

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu = 3,5.

7. Daftar skor penilaian perputaran total asset atau *total asset turn over* (TATO).

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	Skor
$120 < X$	$20 < X$	4
$105 < X \leq 120$	$15 < X \leq 20$	3,5
$90 < X \leq 105$	$10 < X \leq 15$	3
$75 < X \leq 90$	$5 < X \leq 10$	2,5
$60 < X \leq 75$	$0 < X \leq 5$	2
$40 < X \leq 60$	$X \leq 0$	1,5
$20 < X \leq 40$	$X \leq 0$	1
$X \leq 20$	$X \leq 0$	0

Contoh perhitungan:

BUMN "A" pada tahun 1999 memiliki perputaran total asset sebesar 70% dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.

Sesuai daftar skor penilaian perputaran asset, maka skor tahun 1999 menurut:

- tingkat perputaran total asset = 2.
- perbaikan perputaran total asset (10%) = 2,5.

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu = 2,5.

8. Daftar skor penilaian rasio modal sendiri terhadap total asset.

RMS terhadap TA (%) = X	Skor
$X \leq 0$	0
$0 \leq X \leq 10$	2
$10 \leq X \leq 20$	3
$20 \leq X \leq 30$	4
$30 \leq X \leq 40$	6
$40 \leq X \leq 50$	5,5
$50 \leq X \leq 60$	5
$60 \leq X \leq 70$	4,5
$70 \leq X \leq 80$	4,25
$80 \leq X \leq 90$	4
$90 \leq X \leq 100$	3,5

Contoh perhitungan:

BUMN "A" memiliki rasio modal sendiri terhadap total asset sebesar 35%, maka sesuai daftar skor untuk indikator rasio total modal sendiri terhadap total asset adalah 6.

G. Penyebab Krisis Ekonomi.

Penyebab krisis ekonomi yang dibahas oleh banyak pakar ekonomi adalah terjadinya kesalahan kebijakan pembangunan yang sangat mendasar, kesalahan tersebut yaitu (Bambang Ismawan, Mei, 1999;47):

1. Kebijakan Ekonomi yang mengejar pertumbuhan dengan menciptakan kelompok elite yang mendapat berbagai fasilitas untuk tumbuh meraksasa.
2. Terjadi perubahan basis ekonomi pada pertengahan tahun 1980-an. Pada periode ini basis pertumbuhan ekonomi berpindah dari sektor pertanian ke sektor industri.
3. Meningkatnya jumlah hutang luar negeri swasta sejak tahun 1992, yang dalam beberapa tahun terakhir statistik pemerintah tidak sepenuhnya mendata perkembangan hutang.
4. Bobroknya sistem perbankan, bahkan jauh sebelum krisis ekonomi terjadi, banyak bank yang tidak sehat akibat terlalu banyak dibebani ekspansi kredit yang pesat, terus mengucurkan kredit untuk kelompoknya sendiri dan standar kelayakan pemberian kredit dilanggar tanpa kena sanksi.
5. Keraguan akan pemerintah. Menurut survei, bank dunia menunjukkan sebelum juli 1997 banyak investor internasional amat optimis, lilitan birokrasi, korupsi serta lemahnya sistim financial belum mengecilkan nyali investor datang ke Indonesia.
6. Persimpangan politik Indonesia yang terjadi justru di saat krisis tengah melanda. Krisis ekonomi menimpa Indonesia enam bulan menjelang sidang umum MPR. Penolakan masyarakat terhadap pemerintah nasional semakin memperparah keadaan ekonomi makro.

H. Dampak Krisis Ekonomi

Dampak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menurut (Lepi T. Tarmidi, Buletin ekonomi moneter dan perbankan, Volume I, No.4, Maret 1999):

Dewasa ini semua permasalahan dalam krisis ekonomi berputar-putar sekitar kurs nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah yang tetap, bahkan dalam beberapa hal turun ditambah PHK, padahal harga dari banyak barang naik cukup tinggi, kecuali sebagian sektor pertanian dan ekspor. Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam secara umum sudah kita ketahui banyak perusahaan yang tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, PHK dimana-mana, investasi menurun karena impor barang modal menjadi mahal.

Dampak lain adalah laju inflasi yang tinggi selama beberapa bulan terakhir ini, yang bukan disebabkan karena *imported inflation*, tetapi lebih tepat jika dikatakan *foreign exchange induced inflation*. Masalah ini hanya bisa dipecahkan secara mendasar bila nilai tukar valas bisa diturunkan hingga tingkat yang wajar atau nyata (riil). Dengan demikian roda perekonomian bisa berputar kembali dan harga-harga bisa turun dari tingkat yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, meskipun tidak kembali pada tingkat sebelum terjadinya krisis moneter.

Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, pada Oktober 1998 ini jumlah keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5 juta, sehingga perlu dilancarkan program-program untuk menunjang mereka yang dikenal sebagai *social safety net*.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai tukar rupiah yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang karena PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi, sehingga bila nilai tukar rupiah bisa dikembalikan ke nilai nyatanya maka biaya besar yang dibutuhkan untuk *social safety net* ini bisa dikurangi secara drastis. Namun secara keseluruhan dampak negatifnya dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih besar dari dampak positifnya.

I. Cara Mengatasi Krisis Ekonomi

Ada tiga konsep untuk mengatasi krisis ekonomi, yaitu: (Lepi T. Tarmidi, Buletin ekonomi moneter dan perbankan, volume I, No.4, Maret 1999)

1. Bahwasannya krisis ekonomi pada saat ini berputar-putar sekitar kurs nilai tukar valas, tentunya hal pertama yang harus diatasi adalah menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang riil.

Artinya tidak lagi *over valued* ketika *regim managed floating*, bahkan bisa dipertimbangkan untuk membiarkannya sedikit *under valued* untuk meningkatkan daya saing secara internasional dan merangsang produksi dalam negeri dan ekspor.

2. Mengembalikan stabilitas sosial dan politik dan rasa aman secepatnya sehingga bisa memulihkan kepercayaan pemilik modal dalam dan luar negeri.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan sebagai program untuk menunjang keluarga-keluarga miskin yang meningkat akibat krisis ekonomi tersebut.

Dan tentunya masih banyak cara mengatasi krisis ekonomi tersebut namun dengan ketiga solusi diatas kiranya sudah cukup mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Penelitian hanya dilakukan pada objek tertentu dan kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk objek yang diselidiki.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2001.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II, PALEMBANG.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

- a. Bagian Produksi.
- b. Bagian Akuntansi.
- c. Bagian Umum.
- d. Bagian Pemasaran.

2. Objek Penelitian

Laporan Keuangan.

D. Data yang Dicari

1. Data mengenai gambaran umum perusahaan yang akan diteliti.

2. Data mengenai laporan keuangan perusahaan, yang meliputi:
 - a. Laporan keuangan sebelum krisis ekonomi tahun 1995 dan tahun 1996.
 - b. Laporan keuangan saat krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 1999.

E. Variabel Penelitian

■ Variabel Tunggal

Tingkat kesehatan finansial perusahaan adalah suatu kondisi atau kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Tingkat kesehatan finansial perusahaan diukur dengan menggunakan laporan keuangan, yang terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Rugi Laba

Untuk menghitung tingkat kesehatan finansial perusahaan digunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a. Rasio Likuiditas.
- b. Rasio Solvabilitas.
- c. Rasio Rentabilitas.
- d. Rasio Aktivitas.

■ Variabel Moderator

Krisis ekonomi adalah merosot atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menyebabkan bobroknnya perekonomian bangsa Indonesia yang terjadi mulai pertengahan bulan Juli 1997.

F. Definisi Operasional

1. Analisis adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang secara teliti untuk mempelajari sesuatu hal.
2. Perbedaan adalah suatu kondisi dimana kondisi tersebut menunjukkan adanya hal yang berlainan.
3. Tingkat adalah suatu hal yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu kondisi.
4. Kesehatan adalah suatu keadaan yang dapat dikatakan lebih baik.
5. Finansial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang.
6. Perusahaan adalah bentuk organisasi yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan alat atau dengan cara yang teratur yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan menghasilkan suatu barang atau jasa.
7. Krisis adalah suatu keadaan yang genting.
8. Ekonomi adalah bidang pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal keuangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan subjek penelitian yaitu kepala bagian keuangan dan karyawan perusahaan mengenai data laporan keuangan tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 (sebelum krisis) dan tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 (saat krisis).

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti, meliputi neraca perusahaan per 31 Desember 1995, 1996, 1998, 1999, laporan rugi laba perusahaan yang berakhir 31 Desember 1995, 1996, 1998, 1999.

Tujuan dari observasi ini adalah agar penulis memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan yang tersedia di perusahaan yang ada hubungannya dengan penelitian antara lain catatan tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, catatan tentang struktur organisasi perusahaan, catatan tentang bagian-bagian yang ada pada perusahaan dan catatan-catatan pendukung.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan pertama akan digunakan dua cara teknik analisis, yaitu analisis rasio laporan keuangan perusahaan pada sebelum krisis tahun 1995 dan tahun 1996 serta pada saat krisis tahun 1998 dan tahun 1999.

Selain itu akan dilakukan analisis dengan membandingkan hasil perhitungan indikator-indikator penilaian yaitu dengan meembandingkan hasil perhitungan rasio laporan keuangan perusahaan dengan kriteria kinerja BUMN menurut SK Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998.

Digunakan dua cara teknik analisis ini dimaksudkan agar hasil dari analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi kesehatan finansial perusahaan baik sebelum krisis maupun di saat krisis ekonomi.

1. Analisis rasio laporan keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998

Analisis rasio laporan keuangan ini untuk menjawab permasalahan pertama, yang terdiri atas:

- a. Imbalan kepada pemegang saham atau *Return on equity* (ROE).

Rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

- b. Imbalan investasi (ROI).

Rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital employed}} \times 100\%$$

- c. Rasio kas atau *Cash ratio*.

Rumus:

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat berharga jangka pendek}}{\text{Current liabilities}} \times 100\%$$

- d. Rasio lancar atau *Current ratio*.

Rumus:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current asset}}{\text{Current liabilities}} \times 100\%$$

- e. *Collection period*.

Rumus:

$$\text{Collection period} = \frac{\text{Total piutang usaha}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 100\%$$

f. Perputaran persediaan.

Rumus:

$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 100\%$$

g. Perputaran total asset.

Rumus:

$$\text{Perputaran total asset} = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Capital employed}} \times 100\%$$

h. Rasio total modal sendiri.

Rumus:

$$\text{Rasio total modal sendiri} = \frac{\text{Total modal sendiri}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

2. Analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan.

Analisis ini juga digunakan untuk menjawab masalah pertama, yaitu mengetahui kinerja perusahaan yang dicerminkan dengan tingkat kesehatan finansial perusahaan. Langkah-langkah analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian indikator-indikator tersebut diatas. Untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan yang dicerminkan dengan tingkat kesehatan finansial perusahaan. Berikut ini adalah standar bobot penilaian kinerja perusahaan jika dilihat berdasarkan aspek keuangan:

Dengan menilai bobot dari jenis-jenis indikator kinerja perusahaan yang terdiri atas:

- Imbalan kepada pemegang saham (ROE) dengan maksimal bobotnya sebesar 15.

- Imbalan investasi (ROI) dengan maksimal bobotnya sebesar 10.
- Rasio kas dengan maksimal bobotnya sebesar 3.
- Rasio lancar dengan maksimal bobotnya sebesar 4.
- *Collection period* dengan maksimal bobotnya sebesar 4.
- Perputaran persediaan dengan maksimal bobotnya sebesar 4.
- Perputaran total asset dengan maksimal bobotnya sebesar 4.
- Rasio modal sendiri terhadap total aktiva dengan maksimal bobotnya sebesar 6.
- Total keseluruhan indikator tersebut maksimal sebesar 50.

Setelah menjumlahkan seluruh bobot dari indikator-indikator tersebut maka dapatlah diketahui nilai dari kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini terbatas pada aspek keuangan (finansial) atau dengan kata lain penjumlahan dari indikator-indikator tersebut merupakan besarnya kinerja perusahaan yang dicerminkan dari kesehatan keuangan (finansial) perusahaan itu sendiri. Oleh karena sampel tahun yang akan dianalisis empat tahun, yaitu dua tahun untuk sebelum krisis (tahun 1995 dan 1996) dan dua tahun di saat krisis (tahun 1998 dan 1999), maka hasil perhitungan dari masing-masing tahun akan dirata-rata. Dan hasil analisis dari dua tahun yang sudah dirata-rata tersebut akan dicocokkan dengan skor dari masing-masing rasio tersebut. kemudian skor yang didapat dari masing-masing rasio tersebut dibandingkan antara sebelum krisis dan di saat krisis. Dan dengan demikian dapat diketahui apakah ada perbedaan atau tidak tingkat kesehatan finansial sebelum dan di saat krisis ekonomi.

Sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua, penulis melakukan wawancara ataupun observasi langsung mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadi tidaknya perbedaan tingkat kesehatan finansial perusahaan sebelum dan di saat krisis ekonomi. Untuk dugaan sementara krisis ekonomi akan berakibat turunnya tingkat kesehatan finansial perusahaan di saat krisis bila dibanding dengan tingkat kesehatan finansial perusahaan pada saat sebelum krisis ekonomi.

Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi yang dimulai dari krisis moneter yang melanda Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya mengakibatkan naiknya biaya pengadaan jasa tetapi tidak dibarengi dengan naiknya daya beli masyarakat dalam negeri. Tetapi lain halnya dengan perusahaan yang mempunyai pangsa pasar khusus luar negeri (perusahaan yang bergerak di bidang ekspor) tentunya akan mengalami keuntungan yang berlipat ganda, karena mendapatkan tambahan keuntungan dari kenaikan kurs dollar. Dengan demikian analisis masalah kedua adalah analisis kualitatif dengan cara melacak perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur yang menentukan besarnya indikator-indikator kesehatan finansial dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Cikal bakal Pelabuhan Palembang yang sekarang ini sudah dikenal sejak abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi yaitu pada zaman keemasan Sriwijaya yang merupakan pusat perdagangan antar bangsa dan pusat kebudayaan agama Budha. Pelabuhan pada tahun 683 Masehi tidak terletak ditempatnya sekarang, tetapi agak ke hulu di tepi sungai Tatang/Tangga Buntung (situs Kerajaan Sriwijaya).

Periode selanjutnya berabad-abad kemudian yaitu pada tahun 1821 Pelabuhan pindah ke Boom Jati di depan Benteng Kuto Besak (R.S. A.K. Gani sekarang). Pada tahun 1914 pindah lagi ke hilir yang sekarang disebut Gudang Garam. Barulah pada tahun 1924 lokasi Pelabuhan dipindahkan ke Boom Baru sampai saat ini, yang pengukuhan wilayahnya ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1924 dalam Staatblad 545 tahun 1924.

Dalam sejarah perkembangannya terdapat beberapa instansi yang mengelola pelabuhan yaitu:

1924 - 1942 oleh Pemerintah Belanda (Haven Meester).

1942 - 1945 oleh Pemerintah Jepang (Uhno Butai).

1945 - 1946 oleh Masa Peralihan.

1946 - 1948 oleh ALRI.

1948 - 1952 oleh Haven Meester.

1952 - 1958 oleh Syahbandar.

1958 - 1963 oleh Jawatan Pelabuhan.

1963 - 1964 oleh PN Pelabuhan.

1964 - 1969 oleh Penguasa Pelabuhan (Port Authority).

1969 - 1983 oleh Badan Pengusaha Pelabuhan.

1983 - 1993 oleh Perum Pelabuhan II Cabang Palembang.

1993 - sekarang oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.

Sejak tahun 1993, PT Pelabuhan Indonesia II merupakan Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan yang didirikan berdasarkan PP No.5/1985 dan dengan PP No.57/1991 telah dialihkan bentuknya menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mengelola usaha pelabuhan.

Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II berkedudukan di Jakarta yang mengelola Pelabuhan-Pelabuhan yang diusahakan terletak di Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bengkulu, Propinsi Lampung, Propinsi Jawa Barat, DKI Jaya, dan Propinsi Kalimantan Barat.

Cabang Pelabuhan Palembang adalah salah satu Pelabuhan Kelas I yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan. Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang adalah satu-satunya Pelabuhan di Propinsi Sumatera Selatan yang terletak di pedalaman sungai Musi, yang jaraknya lebih kurang 100 km dari ambang luar (nuara) namun demikian Pelabuhan ini berstatus sebagai Pelabuhan laut yang terbuka untuk Perdagangan Internasional. Pelabuhan ini terletak pada posisi koordinat 2o58'48" Lintang Selatan dan 104o46'36" Bujur Timur.

B. Daerah Lingkungan Kerja Cabang Pelabuhan Palembang

Daerah kerja Pelabuhan Palembang pertama kali ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan Staatblad nomor 545 tahun 1924 terakhir yang telah diubah dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan nomor:

85 A tahun 1990
----- tanggal 8 Oktober 1990
Kp. 27/AL.106/Phb-1990

Kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II , pemerintah memberikan hak pengelolaan.

a. Daerah Pemanduan

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang mempunyai daerah kerja perairan wajib pandu kelas I dengan batas wilayah wajib pandu, yang meliputi perairan antara pelampung suar pengenalan (02o11'22"S, 104o57'10"T di muara sungai Musi sampai dengan sungai Keramasan dengan garis bujur 104o44'16"T dan garis lintang 03o41'48"S).

b. Lingkungan Kerja Perairan

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang mempunyai daerah lingkungan kerja perairan seluas 1.003,75 Ha terbentang dari titik di sungai Keramasan sampai ke Pulau Salah Nama.

c. Daerah Lingkungan Kerja Daratan

Lingkungan kerja daratan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang terdiri dari:

- Pelabuhan Boom Baru meliputi areal kerja daratan seluas 24 Ha dengan kedalaman kolam perairan 9 sampai dengan 11 M LWS.

- Pelabuhan Perahu Layar (PPL) sungai Lais meliputi areal kerja daratan seluas 200 Ha dengan kedalaman kolam Pelabuhan 3 sampai dengan 5 M LWS.

d. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Batas daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan sebagaimana koordinat luasnya meliputi lebih kurang 500 Ha. Dihitung dari tepi sungai Musi pada kondisi pasang harian (M.S.L) ke arah daratan 200 meter.

Pelabuhan sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan merupakan sarana untuk menyelenggarakan tempat naik turunnya penumpang dan bongkar muat barang serta menunjang angkutan laut. Sebagai titik temu dan salah satu mata rantai transportasi antar moda angkutan laut dan angkutan darat dalam sistem distribusi global barang perdagangan, Pelabuhan mempunyai peran aktif dan dinamis bagi kelancaran arus barang, hewan, dan mobilitas manusia yang menggunakan kedua moda angkutan tersebut.

C. Kegiatan Usaha Perusahaan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II mendasarkan pada prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan perusahaan menyediakan dan mengusahakan jasa pelabuhan untuk menunjang kelancaran transportasi laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
- b. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan dapat mandiri dalam pembiayaan serta diharapkan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui Dana Pembangunan Semesta.

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II menyelenggarakan berbagai jenis/bidang usaha antara lain:

1. Menyediakan dan mengusahakan perairan dan kolam Pelabuhan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh.
2. Menyediakan dan mengusahakan pelayanan jasa pemanduan dan pemundaan kapal keluar masuk kepelabuhan, olah gerak kapal dalam kolam pelabuhan.
3. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas Dermaga untuk kapal bertambat dan melakukan bongkar muat barang, hewan serta terminal untuk embarkasi (keberangkatan) dan debarkasi (kedatangan) penumpang.
4. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas pergudangan dan lapangan penumpang barang, alat-alat bongkar muat serta peralatan Pelabuhan.
5. Menyediakan dan mengusahakan terminal Peti Kemas untuk melayani bongkar-muat Peti Kemas Pelabuhan.
6. Menyediakan dan mengusahakan jasa pelayanan bongkar-muat barang di terminal konvensional.
7. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas listrik, air minum, dan telepon untuk kapal dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan.
8. Menyediakan dan mengusahakan lahan untuk berbagai bangunan dan ruang perkantoran umum sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri.
9. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas pelayanan Rumah Sakit untuk umum, serta pendidikan, dan latihan kepelabuhan.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dalam perusahaan adalah kerangka kerja yang menunjukkan hubungan antar bagian, tugas, dan tanggung jawab sehingga jelas kedudukan dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Tepat tidaknya struktur organisasi suatu perusahaan akan mempengaruhi terhadap perkembangan usaha secara keseluruhan. Pada dasarnya bentuk organisasi dari manajemen perusahaan diarahkan untuk mencapai atau memanfaatkan dana semaksimal mungkin agar tujuan perusahaan tercapai dengan baik.

Berikut ini akan dideskripsikan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perusahaan sebagai berikut:

1. *General Manager*

a. Tugas Pokok

Sebagai pimpinan tertinggi, seorang *General Manager* mempunyai tugas pokok untuk mengelola, menyiapkan program kerja dan melaksanakan pelayanan usaha jasa kepelabuhan yang meliputi pelayanan kepanduan, pelayanan terminal, fasilitas untuk kapal, barang, penumpang, hewan, dan usaha jasa pelayanan kesehatan serta penunjang lainnya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Fungsi

Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana Kerja Manajemen dan Rencana Kerja Anggaran.

- 2) Melaksanakan penyusunan laporan sebagai gambaran kinerja perusahaan kepala direksi.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II.

c. Kedudukan

Sesuai dengan struktur organisasi, *General Manager* Pelabuhan Palembang membawahi:

- 1) Divisi Kepanduan.
- 2) Divisi Pelayanan Fasilitas, Usaha Terminal dan Peti Kemas.
- 3) Divisi Teknik.
- 4) Divisi Keuangan.
- 5) Divisi Personalia dan Umum.
- 6) Sub Bagian Pemasaran dan Data dan Informasi.

d. Tanggung Jawab

General Manager bertanggung jawab atas kelangsungan pelaksanaan berbagai kegiatan dan bermacam pekerjaan pendukung dalam operasional serta tersedianya data yang bermateri, cukup dan akurat bagi kepentingan evaluasi dan analisa kinerja perusahaan.

2. Manajer Kepanduan (Kepala Divisi Kepanduan)

a. Tugas Pokok

Membantu *General manager* dalam menyiapkan program kerja dan melaksanakan usaha jasa pelayanan pemanduan, penundaan, penambatan keluar/masuk kapal, oleh gerak kapal serta kegiatan telekomunikasi pelabuhan.

b. Fungsi

Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Rencana Kerja Manajemen dan menjabarkan Rencana Kerja Operasional.
- 2) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk kepentingan analisis dan evaluasi serta penyiapan bahan laporan sebagai gambaran kinerja kepada *General Manager*.

c. Kedudukan

Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala Divisi Kepanduan membawahi:

- 1) Dinas Pemanduan dan Armada
- 2) Dinas Telekomunikasi dan Administrasi Kepanduan

d. Tanggung jawab

Kepala Divisi Kepanduan bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan operasional kepanduan dan tersedianya data yang akurat bagi kepentingan evaluasi dan analisa kinerja Divisi Kepanduan.

3. Manajer Pelayanan Jasa (Kepala Divisi Pelayanan Jasa)

a. Tugas Pokok

Tugas pokok dari manajer pelayanan jasa adalah membantu *General Manager* dalam menyiapkan program kerja dan melaksanakan usaha jasa pelayanan fasilitas kapal, barang peti kemas dan non peti kemas, fasilitas umum serta pelayanan jasa usaha terminal.

b. Fungsi

Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Rencana Kerja Manajemen dan menjabarkan Rencana Kerja Operasional.
- 2) Melaksanakan penilikan terhadap kelancaran angkutan darat serta ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan pelabuhan.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk kepentingan analisis dan evaluasi serta penyiapan bahan laporan sebagai gambaran kinerja kepada *General Manager*.

c. Kedudukan

Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala Divisi Pelayanan Fasilitas, Usaha Terminal dan Peti Kemas membawahi:

- 1) Dinas Pelayanan Fasilitas Kapal dan Barang.
- 2) Dinas Pelayanan Fasilitas Umum dan Administrasi.
- 3) Dinas Usaha Terminal.
- 4) Dinas Usaha Terminal Peti Kemas.

d. Tanggung Jawab

Kepala Divisi Pelayanan Fasilitas, Usaha Terminal dan Peti Kemas bertanggung jawab atas kelanggengan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pelayanan kapal, barang, pelayanan umum, usaha terminal dan peti kemas serta tersedianya data yang akurat bagi kepentingan evaluasi dan analisa kinerja Divisi Pelayanan Fasilitas, Usaha Terminal dan Peti Kemas.

4. Manajer Teknik dan Sistem Informasi (Kepala Divisi Teknik dan Sistem Informasi)

a. Tugas Pokok

Tugas pokok dari manajer teknik dan sistem informasi yaitu membantu *General Manager* dalam menyiapkan program kerja dan melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelabuhan.

b. Fungsi

Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Rencana Kerja Manajemen dan menjabarkan Rencana Kerja Operasional.
- 2) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk kepentingan analisis dan evaluasi, serta penyiapan bahan laporan sebagai gambaran kinerja kepada *General manager*.

c. Kedudukan

Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala divisi Teknik membawahi:

- 1) Dinas Teknik Sipil.
- 2) Dinas Teknik Mesin, Listrik dan Pengadaan.

d. Tanggung Jawab

Kepala Divisi Teknik bertanggung jawab atas kelanggengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana pelabuhan serta tersedianya data yang akurat bagi kepentingan evaluasi dan analisa kinerja Divisi Teknik.

5. Manajer Keuangan

a. Tugas Pokok

Tugas pokok dari manajer keuangan adalah membantu *General Manager* dalam menyiapkan program kerja dan pelaksanaan pengendalian pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan pelabuhan cabang.

b. Fungsi

Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efisien dan efektif, perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Rencana Kerja Manajemen dan menjabarkan Rencana Kerja Operasional.
- 2) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk kepentingan penyusunan laporan, analisis dan evaluasi keuangan serta penyiapan bahan laporan sebagai gambaran kinerja kepada *General Manager*.

c. Kedudukan

Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala Divisi Keuangan membawahi:

- 1) Divisi Akuntansi.
- 2) Divisi Pendapatan dan Perbendaharaan.

d. Tangung Jawab

Kepala Divisi Keuangan bertanggung jawab atas kelangsungan pelaksanaan pengelolaan keuangan kegiatan akuntansi, dan perbendaharaan cabang serta tersedianya data yang akurat bagi kepentingan evaluasi dan analisa kinerja Divisi Keuangan.

6. Manajer Sumber Daya Manusia (Kepala Divisi Personalia dan Umum)

a. Tugas Pokok

Tugas pokok dari manajer sumber daya manusia adalah membantu *General Manager* dalam menyiapkan program kerja dan pelaksanaan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, penanganan aspek hukum dan pengamanan di lingkungan kerja pelabuhan.

b. Fungsi

Untuk terselenggaranya tugas pokok tersebut secara efisien dan efektif, perlu dilaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Rencana Kerja Manajemen dan menjabarkan Rencana Kerja Operasional.
- 2) Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk kepentingan analisis dan evaluasi, serta penyiapan bahan laporan sebagai gambaran kinerja kepada *General Manager*.

c. Kedudukan

Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala Dinas Personalia dan Umum membawahi:

- 1) Dinas Personalia
- 2) Dinas Umum dan Rumah Tangga
- 3) Dinas Hukum dan Pengamanan

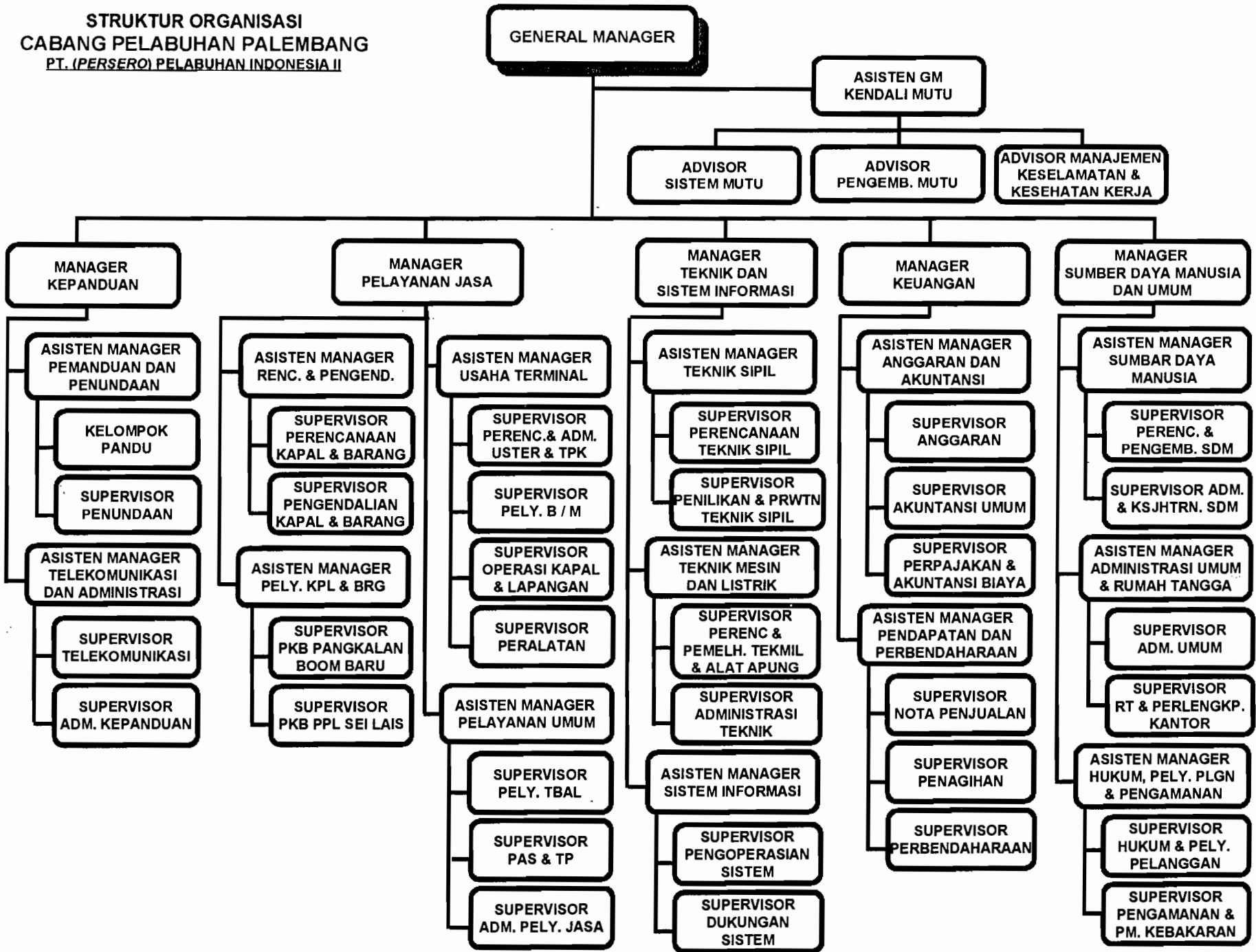


d. Tanggung Jawab

Kepala Divisi Personalia dan Umum bertanggung jawab atas kelangsungan pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia, ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan kegiatan umum lainnya serta tersedianya data yang akurat bagi kepentingan evaluasi dan analisa kinerja Divisi Personalia dan Umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT (Perseero) Pelabuhan Indonesia II nomor HK.56/2/16/PI.II-94, tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Unit di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, dengan struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
CABANG PELABUHAN PALEMBANG
PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II**



Sumber: PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Palembang

E. Personalia

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang mempunyai 266 orang tenaga kerja tetap yang terdiri atas 251 orang tenaga kerja pria dan 25 orang wanita. Selain itu terdapat 30 orang tenaga kerja kontrak. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II menggunakan sistem 5 hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hari Senin - Kamis (8 jam)
 - Pagi : pukul 07.00 - 12.00 (5 jam)
 - Istirahat : pukul 12.00 - 13.00
 - Sore : pukul 13.00 - 16.00 (3 jam)
2. Hari Jumat (6 jam)
 - Pagi : pukul 07.00 - 11.00 (4 jam)
 - Istirahat : pukul 11.00 - 13.00
 - Sore : pukul 13.00 - 15.00 (2 jam)
3. Hari Sabtu : Libur

Sistem gaji yang digunakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang adalah *Merit System*, yaitu sistem gaji berdasarkan klas jabatan. Adapun klas jabatan tersebut, yaitu: klas I, II, III, IV, VI dan VIII terdapat di kantor Pusat di Jakarta. Sedangkan klas jabatan yang ada di kantor Cabang di Palembang adalah sebagai berikut:

- Klas V : *General Manager.*
- Klas VII : *Manajer.*
- Klas IX : *Asisten Manajer.*
- Klas X : *Supervisor.*
- Klas XI sampai dengan XIII : *Operator/Satuan Pengawas.*
- Klas XIV sampai dengan XVI : *Klas Pelaksana.*

Sistem lembur khusus atau lembur penunjang operasional di peruntukan untuk klas jabatan X sampai dengan XVI dengan sistem jam gerakan. Adapun tarif untuk masing-masing jam gerakan adalah sebagai berikut:

- Klas X - XII : Rp 1600/jam.
- Klas XIII - XVI : Rp 1200/jam.

Sebagai tambahan kesejahteraan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang diberikan jaminan sosial di luar komponen gaji adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan Prestasi.
2. Tunjangan Hari Raya.
3. Gaji ke XIII.
4. Jasa Proyek/Bonus.
5. Cuti.
6. Tunjangan Kematian Karyawan.

Para karyawan diberi cuti sebagai berikut:

1. Cuti tahunan.
2. Cuti besar selama 1 bulan.

3. Cuti sakit selama 1 bulan.
4. Cuti bersalin selama 3 bulan untuk karyawan perempuan.
5. Cuti di luar tanggungan perusahaan, maksimal 2 tahun dan tidak digaji.

Untuk meningkatkan produktivitas atau prestasi karyawan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang melakukan Penilaian Karya Pegawai (PKP) yang dilakukan 3 bulan sekali dan hasil dari penilaian ini akan berpengaruh pada besarnya bonus atau jasa proyek yang diterima karyawan dalam kurun waktu 1 tahun.

F. Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

1. Sumber Modal Kerja

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang sumber modal kerja berasal dari:

a. Hasil Operasi Perusahaan

Jumlah *net income* yang nampak dalam laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dan dapat dihitung dengan menganalisa laporan rugi laba dari perusahaan tersebut. Dengan adanya keuntungan atau laba dari usaha perusahaan dan apabila laba tersebut tidak diambil oleh pemilik perusahaan, maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan.

b. Keuntungan dari Penjualan Surat-surat Berharga (Investasi Jangka Pendek)

Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan.

Dengan adanya penjualan surat berharga ini menyebabkan perusahaan dalam unsur modal kerja, yaitu bentuk surat berharga menjadi uang kas. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan surat berharga ini merupakan suatu sumber untuk bertambahnya modal kerja. Di dalam menganalisa sumber-sumber modal kerja, maka sumber yang berasal dari keuntungan penjualan surat-surat berharga harus dipisahkan dengan modal kerja yang berasal dari usaha pokok perusahaan.

c. Penjualan Aktiva Tidak Lancar

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut. Apabila dari hasil penjualan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar lainnya ini tidak segera digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, akan menyebabkan keadaan aktiva lancar sedemikian besarnya sehingga melebihi modal kerja yang dibutuhkan (adanya modal kerja yang berlebihan).

d. Penjualan Saham atau Obligasi

Untuk menambah modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya, disamping itu perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi atau hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya.

Penjualan obligasi ini mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap, oleh karena itu dalam mengeluarkan hutang dalam bentuk obligasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Penjualan obligasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan disamping beban bunga yang besar, juga akan mengakibatkan keadaan aktiva lancar yang besar sehingga melebihi modal kerja yang dibutuhkan.

G. Pemasaran

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang adalah perusahaan jasa yang melayani berbagai macam jasa pelabuhan, seperti apa yang telah ditulis di depan. Di dalam memasarkan jasanya perusahaan mengutamakan unsur kejelian dalam mengintip harga maupun membaca permintaan pasar. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang telah mempunyai pasar yang tetap. Hal ini merupakan hasil negosiasi dengan berbagai pihak, baik pasar lokal maupun pasar ekspor dan impor.

Sarana dan prasarana untuk menunjang operasi perusahaan pun sudah lengkap, seperti pergudangan, terminal peti kemas, kapal dan sarana penunjang lainnya. Untuk memajukan kegiatan operasinya perusahaan ini melakukan promosi melalui kegiatan pameran iptek, PRJ, iklan di media cetak maupun elektronik dan menjadi sponsor-sponsor olah raga atau kegiatan lainnya.

H. Keuangan

Dalam melakukan analisis keuangan, data yang diambil dari laporan keuangan pokok adalah Neraca dan Laba Rugi yang disajikan tahunan. Adapun kondisi keuangan perusahaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang yang akan dicantumkan pada bagian analisis masalah laporan keuangan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang disusun oleh Divisi Akuntansi di bawah tanggung jawab manajer keuangan. Laporan yang dibuat oleh Divisi Akuntansi tersebut adalah Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasa digunakan adalah tahunan yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Periode seperti ini disebut periode tahun kalender.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data utama yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dikemukakan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari hasil penelitian di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang. Dengan penelitian ini akan mengetahui kondisi keuangan perusahaan atau menilai tingkat kesehatan finansial perusahaan sebelum dan di saat krisis ekonomi dengan melihat laporan keuangan tahun 1995 dan 1996 sebagai tahun sebelum krisis ekonomi dan tahun 1998 dan 1999 sebagai tahun pada saat krisis ekonomi terjadi. Sedangkan laporan keuangan tahun 1997 tidak dikemukakan di sini karena tahun 1997 merupakan masa transisi antara sebelum krisis dan di saat krisis ekonomi.

Data keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini, meliputi:

- Neraca per 31 Desember 1995 (sebelum krisis ekonomi)
- Neraca per 31 Desember 1996 (sebelum krisis ekonomi)
- Neraca per 31 Desember 1998 (pada saat krisis ekonomi)
- Neraca per 31 Desember 1999 (pada saat krisis ekonomi)
- Laporan Laba-Rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 1995 (sebelum krisis ekonomi)

- Laporan Laba-Rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 1996 (sebelum krisis ekonomi)
- Laporan Laba-Rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 1998 (pada saat krisis ekonomi)
- Laporan Laba-Rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 1999 (pada saat krisis ekonomi)

Data-data keuangan yang berupa Neraca maupun Laporan Laba-Rugi tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1
Neraca
Per 31 Desember 1995

AKTIVA			PASIVA		
no	Rekening	Neraca Per 31-12-1995 (Rp)	no	Rekening	Neraca Per 31-12-1995 (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		V	PASIVA LANCAR	
	Kas Bank	614.238.686,00		Hut. usaha	262.324.611,00
	Deposito & kertas berharga	,00		Hut. red. pendapatan	,00
	Piut. usaha	848.437.223,00		Uang panjar	21.804.884,00
	Penysh. piut. usaha	(297.614.647,00)		Uang titipan	52.771.294,00
	Piut. pegawai	19.472.875,00		Hut. jangka panjang yg akan jatuh tempo	,00
	Penysh. piut. pegawai	,00		Hut. pajak lainnya	70.810.506,00
	Piut. lain-lain	58.961.109,00		Hut. dana pensiun	1.244.317,00
	Penysh. piut. lain-lain	,00		Biaya yg masih harus dibayar	304.560.214,00
	Uang muka	15.088.062,00		Pdpt. yg diterima dimuka	15.820.756,00
	Penysh. uang muka	,00		PPN Keluaran	55.072.396,00
	Persediaan	112.852.663,00		Hut Lancar lain-lain	,00
	Penysh. persediaan	,00		Jumlah	784.408.978,00
	Biaya yg dibayar dimuka	216.240.339,00	VI	HUTANG JANGKA PANJANG	
	Pdpt yg m. a. diterima	132.525.086,00		Hut. jaminan	,00
	PPN masukan	43.295.970,00		Hut. jk. pjg. lain-lain	,00
	Aktiva Lancar lain-lain	,00		Jumlah	,00
	Jumlah	1.763.497.366,00	VII	REKENING KORAN	
II	AKTIVA TETAP			R/K kantor pusat lancar	(2.544.362.930,00)
	Nilai perolehan A.T	41.836.936.156,00		R/K kantor pusat permanen	41.553.529.452,00
	Akum. penyusutan A. T	(3.169.412.248,00)		Jumlah	39.009.166.522,00
	Jumlah	38.667.523.908,00	VIII	R/L tahun berjalan	729.698.838,00
III	AKTIVA TETAP Dlm. KONSTRUKSI				
	A.T dalam konstruksi	26.539.091,00			
IV	AKTIVA LAIN-LAIN				
	Biaya yg ditangguhkan	81.704.546,00			
	Ak. amortisasi biaya yg ditangguhkan	(16.340.909,00)			
	A.T tidak berfungsi	336,00			
	Uang jaminan	350.000,00			
	Aktiva tidak dapat dipergunakan	,00			
	Jumlah A.T dlm. konst. & A.T lain-lain	92.253.064,00			
	JUMLAH AKTIVA	40.523.274.338,00		JUMLAH PASIVA	40.523.274.338,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

Tabel 2
Neraca
Per 31 Desember 1996

AKTIVA			PASIVA		
no	Rekening	Neraca Per 31-12-1996 (Rp)	no	Rekening	Neraca Per 31-12-1996 (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		V	PASIVA LANCAR	
	Kas Bank	709.349.408,00		Hut. usaha	1.878.673.150,00
	Deposito & kertas berharga	,00		Hut. red. pendapatan	,00
	Piut. usaha	899.063.012,00		Uang panjar	44.017.336,00
	Penysh. piut. usaha	(307.576.665,00)		Uang titipan	90.442.187,00
	Piut. pegawai	45.204.761,00		Hut. jangka panjang yg akan jatuh tempo	,00
	Penysh. piut. pegawai	,00		Hut. pajak lainnya	66.941.973,00
	Piut. lain-lain	586.859.262,00		Hut. dana pensiun	629.600,00
	Penysh. piut. lain-lain	,00		Biaya yg masih harus dibayar	391.015.286,00
	Uang muka	38.673.750,00		Pdpt. yg diterima dimuka	745.123.067,00
	Penysh. uang muka	,00		PPN Keluaran	35.878.105,00
	Persediaan	127.679.472,00		Hut. Lancar lain-lain	,00
	Penysh. persediaan	,00		Jumlah	3.252.720.704,00
	Biaya yg dibayar dimuka	239.046.648,00	VI	HUTANG JANGKA PANJANG	
	Pdpt yg m. a. diterima	175.790.146,00		Hut. jaminan	,00
	PPN masukan	49.092.981,00		Hut. jk. pjg. lain-lain	,00
	Aktiva Lancar lain-lain	,00		Jumlah	,00
	Jumlah	2.563.182.775,00	VII	REKENING KORAN	
II	AKTIVA TETAP			R/K kantor pusat lancar	(4.089.985.927,00)
	Nilai perolehan A.T	42.282.035.354,00		R/K kantor pusat permanen	42.283.228.290,00
	Akum. penyusutan A.T	(4.072.418.244,00)		Jumlah	38.193.242.363,00
	Jumlah	38.209.617.110,00	VIII	R/L tahun berjalan	836.215.098,00
III	AKTIVA TETAP Dlm. KONSTRUKSI				
	A.T dalam konstruksi	1.337.199.580,00			
IV	AKTIVA LAIN-LAIN				
	Biaya yg ditangguhkan	156.157.455,00			
	Ak. Amortisasi biaya yg ditangguhkan	(32.681.818,00)			
	A.T tidak berfungsi	45.353.063,00			
	Uang jaminan	3.350.000,00			
	Aktiva tidak dapat dipergunakan	,00			
	Jumlah A.T dlm konst. & A.T lain-lain	1.509.378.280,00			
	JUMLAH AKTIVA	42.282.178.165,00		JUMLAH PASIVA	42.282.178.165,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

Tabel 3
Neraca
Per 31 Desember 1998

AKTIVA			PASIVA		
no	Rekening	Neraca Per 31-12-1998 (Rp)	no	Rekening	Neraca Per 31-12-1998 (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		V	PASIVA LANCAR	
	Kas Bank	993.537.178,00		Hut. usaha	1.279.909.254,00
	Deposito & kertas berharga	,00		Hut. red pendapatan	,00
	Piut. usaha	1.006.386.910,00		Uang panjar	176.385.385,00
	Penysh. piut. usaha	(104.454.133,00)		Uang titipan	275.065.458,00
	Piut. pegawai	25.474.109,00		Hut. jangka panjang yg akan jatuh tempo	,00
	Penysh. piut. pegawai	,00		Hut. pajak lainnya	134.671.073,00
	Piut. lain-lain	4.229.220,00		Hut. dana pensiun	,00
	Penysh. piut. lain-lain	,00		Biaya yg masih harus dibayar	125.835.993,00
	Uang muka	26.610.480,00		Pdpt. yg diterima dimuka	21.862.766,00
	Penysh. uang muka	,00		PPN Keluaran	150.707.788,00
	Persediaan	122.409.117,00		Hut Lancar lain-lain	,00
	Penysh. persediaan	,00		Jumlah	2.164.437.717,00
	Angs. pjg. penghasilan badan	,00	VI	HUTANG JANGKA PANJANG	
	Biaya yg dibayar dimuka	276.789.827,00		Hut. jaminan	22.500.000,00
	Pdpt. yg m. a diterima	505.766.605,00		Hut. jk. pjg. Lain- lain	1.340.010.883,00
	PPN masukan	92.513.767,00		Jumlah	1.362.510.883,00
	Aktiva lancar lain-lain	,00	VII	REK KORAN	
	Jumlah	2.949.263.080,00		R/K kantor pusat lancar	(14.087.768.157,00)
II	AKTIVA TETAP			R/K kantor pusat permanen	46.475.658.523,00
	Nilai perolehan A T	42.153.437.944,00		Jumlah	32.387.890.366,00
	Akm. penyusutan A T	(6.308.480.122,00)	VIII	R/L tahun berjalan	3.005.107.274,00
	Jumlah	35.844.957.822,00			
III	AKTIVA TETAP Dlm. KONSTRUKSI				
	A. T dlm konstruksi	16.757.000,00			
IV	AKTIVA LAIN-LAIN				
	Biaya yg ditangguhkan	156.157.455,00			
	Ak. amortisasi biaya yg ditangguhkan	(92.542.180,00)			
	A.T tidak berfungsi	45.353.063,00			
	Uang jaminan	,00			
	Aktiva tidak dapat dipergunakan	,00			
	Jumlah A.T dlm. konst & A T lain-lain	125.725.338,00			
	JUMLAH AKTIVA	38.919.946.240,00		JUMLAH PASIVA	38.919.946.240,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

Tabel 4
Neraca
Per 31 Desember 1999

AKTIVA			PASIVA		
no	Rekening	Neraca Per 31-12-1999 (Rp)	no	Rekening	Neraca Per 31-12-1999 (Rp)
I	AKTIVA LANCAR		V	PASIVA LANCAR	
	Kas Bank	2.113.556.693,00		Hut. usaha	2.394.961.095,00
	Deposito & kertas berharga	,00		Hut. red. pendapatan	,00
	Piut. usaha	955.508.810,00		Uang panjar	413.849.576,00
	Penysh piut. usaha	(54.713.221,00)		Uang titipan	277.131.602,00
	Piut. pegawai	942.918,00		Hut. jangka panjang yg akan jatuh tempo	,00
	Penysh piut. pegawai	,00		Hut. pajak lainnya	153.168.341,00
	Piut. lain-lain	9.085.500,00		Hut. dana pensiun	,00
	Penysh piut. lain-lain	,00		Biaya yg masih harus dibayar	121.814.185,00
	Uang muka	48.170.909,00		Pdpt. yg diterima dimuka	258.907.761,00
	Penysh uang muka	,00		PPN Keluaran	199.966.490,00
	Persediaan	119.498.822,00		Hut Lancar lain-lain	,00
	Penysh persediaan	,00		Jumlah	3.819.799.050,00
	Angs. pjg. penghasilan badan	,00	VI	HUTANG JANGKA PANJANG	
	Biaya yg dibayar dimuka	311.854.500,00		Hut. jaminan	22.500.000,00
	Pdpt. yg. m. a diterima	440.515.144,00		Hut. jk. pjg. lain-lain	931.727.579,00
	PPN masukan	149.192.104,00		Jumlah	954.227.579,00
	Aktiva lancar lain-lain	,00	VII	REK. KORAN	
	Jumlah	4.093.612.179,00		R/K kantor pusat lancar	(8.161.238.646,00)
II	AKTIVA TETAP			R/K kantor pusat permanen	56.817.247.077,00
	Nilai perolehan A.T	59.922.745.054,00		Jumlah	48.656.008.431,00
	Akm. penyusutan A.T	(10.235.134.376,00)	VIII	R/L tahun berjalan	651.925.126,00
	Jumlah	49.687.610.678,00			
III	AKTIVA TETAP Dlm. KONSTRUKSI				
	A. T dlm konstruksi	16.757.000,00			
IV	AKTIVA LAIN-LAIN				
	Biaya yg ditangguhkan	473.905.956,00			
	Ak. amortisasi biaya yg ditangguhkan	(189.925.964,00)			
	A.T tidak berfungsi	337,00			
	Uang jaminan	,00			
	Aktiva tidak dapat dipergunakan	,00			
	Jumlah AT dlm konst. & A.T lain-lain	300.737.329,00			
	JUMLAH AKTIVA	54.081.960.186,00		JUMLAH PASIVA	54.081.960.186,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

Tabel 5
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari-31. Desember 1995

No	URAIAN	Tahun 1995 (Rp)
1	2	3
I	<u>PENDAPATAN USAHA</u>	
	Pendapatan Fasilitas Pokok Pelabuhan	1.425.921.758,00
	Pendapatan Pelayanan Kapal	3.694.048.051,00
	Pendapatan Fasilitas Penumpukan	.985.945.765,00
	Pendapatan Pengusahaan Alat-alat	42.500,00
	Pendapatan Pelayanan Terminal	63.319.150,00
	Pendapatan Pelayanan Terminal Peti Kemas	1.679.618.282,00
	Pendapatan Pelayanan Terminal Curah Kering	,00
	Pendapatan Pelayanan Terminal Curah Cair	,00
	Pendapatan Pelayanan Konsolidasi Muatan	,00
	Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	373.231.366,00
	Pendapatan Pelabuhan Khusus	88.620.357,00
	Pendapatan Dermaga/Tambatan Khusus	763.993.475,00
	Pendapatan Rupa-rupa Usaha	1.252.604.108,00
	Jumlah Pendapatan Kotor (A)	10.327.344.812,00
	Reduksi Pendapatan (B)	,00
	Jumlah Pendapatan Usaha Bersih (A-B) = C	10.327.344.812,00
II	<u>BIAYA OPERASI</u>	
1	Biaya Operasi Langsung:	
	Biaya Fasilitas Pokok Pelabuhan	422.124.433,00
	Biaya Fasilitas Pelayanan Kapal	3.836.033.532,00
	Biaya Fasilitas Penumpukan	298.631.311,00
	Biaya Pengusahaan Alat-Alat	,00
	Biaya Pelayanan Terminal	204.919.379,00
	Biaya Pelayanan Terminal Peti Kemas	739.158.722,00
	Biaya Pelayanan Terminal Curah Kering	,00
	Biaya Pelayanan Terminal Curah Cair	,00
	Biaya Pelayanan Konsolidasi Muatan	,00
	Biaya Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	173.933.199,00
	Biaya Pelabuhan Khusus	2.813.436,00
	Biaya Dermaga/Tambatan Khusus	,00
	Biaya Rupa-rupa Usaha	1.142.890.201,00
	Jumlah Biaya Operasi Langsung (D)	6.820.504.213,00
2	Biaya Operasi Tak Langsung:	
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Jasa	138.613.798,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Kepanduan	231.956.098,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Usaha Terminal	,00
	Jumlah Biaya Operasi Tak Langsung (E)	370.569.896,00
3	Biaya Penunjang Operasi:	
	Biaya Penunjang Operasi Divisi Teknik	518.547.948,00
	Biaya Penunjang Operasi Divisi Keuangan	413.331.515,00
	Biaya Penunjang Operasi Kepala Cabang dan Bagian Umum	1.344.199.720,00
	Jumlah Biaya Penunjang Operasi (F)	2.276.079.183,00
	Jumlah Biaya Operasi (D+E+F) = G	9.467.153.292,00
	Laba Kotor (C-G) = H	860.191.520,00
III	<u>PENDAPATAN dan BIAYA DI LUAR USAHA</u>	
	Pendapatan Di Luar Usaha	82.100.424,00
	Biaya Di Luar Usaha	119.266.188,00
	Selisih Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha (I)	(37.165.764,00)
	(H+I) = J	823.025.756,00
IV	POS-POS LUAR BIASA	
	Pos-pos Luar Biasa (K)	39.457.418,00
V	BIAYA PENUGASAN	53.869.500,00
VI	RUGI LABA USAHA (J+K) = L	729.698.838,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

Tabel 6
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari-31 Desember 1996

No	URAIAN	Tahun 1996 (Rp)
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	
	Pendapatan Fasilitas Pokok Pelabuhan	1.583.920.912,00
	Pendapatan Pelayanan Kapal	4.216.620.480,00
	Pendapatan Fasilitas Penumpukan	1.083.895.098,00
	Pendapatan Pengusahaan Alat-alat	,00
	Pendapatan Pelayanan Terminal	83.860.363,00
	Pendapatan Pelayanan Terminal Peti Kemas	1.737.653.509,00
	Pendapatan Pelayanan Terminal Curah Kering	,00
	Pendapatan Pelayanan Terminal Curah Cair	,00
	Pendapatan Pelayanan Konsolidasi Muatan	,00
	Pendapatan Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	479.018.791,00
	Pendapatan Pelabuhan Khusus	69.777.316,00
	Pendapatan Dermaga/Tambatan Khusus	656.935.234,00
	Pendapatan Rupa-rupa Usaha	1.385.913.034,00
	Jumlah Pendapatan Kotor (A)	11.297.594.737,00
	Reduksi Pendapatan (B)	,00
	Jumlah Pendapatan Usaha Bersih (A-B) = C	11.297.594.737,00
II	BIAYA OPERASI	
1	Biaya Operasi Langsung:	
	Biaya Fasilitas Pokok Pelabuhan	412.236.214,00
	Biaya Fasilitas Pelayanan Kapal	4.288.390.845,00
	Biaya Fasilitas Penumpukan	325.216.128,00
	Biaya Pengusahaan Alat-Alat	,00
	Biaya Pelayanan Terminal	93.450.218,00
	Biaya Pelayanan Terminal Peti Kemas	826.883.896,00
	Biaya Pelayanan Terminal Curah Kering	,00
	Biaya Pelayanan Terminal Curah Cair	,00
	Biaya Pelayanan Konsolidasi Muatan	,00
	Biaya Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	179.946.900,00
	Biaya Pelabuhan Khusus	,00
	Biaya Dermaga/Tambatan Khusus	,00
	Biaya Rupa-rupa Usaha	1.238.492.951,00
	Jumlah Biaya Operasi Langsung (D)	7.364.617.152,00
2	Biaya Operasi Tak Langsung:	
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Jasa	175.549.506,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Kepanduan	237.561.066,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Usaha Terminal	,00
	Jumlah Biaya Operasi Tak Langsung (E)	413.110.572,00
3	Biaya Penunjang Operasi:	
	Biaya Penunjang Operasi Divisi Tehnik	594.171.866,00
	Biaya Penunjang Operasi Divisi Keuangan	520.960.217,00
	Biaya Penunjang Operasi Kepala Cabang dan Bagian Umum	1.654.202.063,00
	Jumlah Biaya Penunjang Operasi (F)	2.769.334.146,00
	Jumlah Biaya Operasi (D+E+F) = G	10.547.061.870,00
	Laba Kotor (C-G) = H	650.532.867,00
III	PENDAPATAN dan BIAYA DI LUAR USAHA	
	Pendapatan Di Luar Usaha	145.925.703,00
	Biaya Di Luar Usaha	60.243.472,00
	Selisih Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha (I)	85.682.231,00
	(H+I) = J	836.215.098,00
IV	POS-POS LUAR BIASA	
	Pos-pos Luar Biasa (K)	,00
V	BIAYA PENUGASAN	,00
VI	RUGI LABA USAHA (J+K) = L	836.215.098,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

Tabel 7
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari-31 Desember 1998

No	URAIAN	Tahun 1998 (Rp)
1	2	3
I	<u>PENDAPATAN USAHA</u>	
	Pelayanan Jasa kapal	10.028.535.681,00
	Pelayanan Jasa Barang	2.012.515.047,00
	Pengusahaan Alat	,00
	Pelayanan Terminal	223.160.066,00
	Pelayanan Terminal Peti Kemas	2.778.264.533,00
	Pendapatan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	465.823.616,00
	Pendapatan Pelayanan Kerjasama Operasi	,00
	RSP/Puskespel/Unit Kesehatan	,00
	Pendapatan Pelayanan Pelabuhan/Dermaga Khusus	1.070.498.516,00
	Pendapatan Pelayanan Rupa-rupa Usaha	620.676.819,00
	Jumlah Pendapatan Kotor (A)	17.199.474.278,00
	Reduksi Pendapatan (B)	4.649.066.978,00
	Jumlah Pendapatan Usaha Bersih (A-B) = C	12.550.407.300,00
II	<u>BIAYA OPERASI</u>	
1	Biaya Operasi Langsung:	
	Biaya Pelayanan Jasa Kapal	2.886.290.224,00
	Biaya Pelayanan Jasa Barang	883.744.993,00
	Biaya Pengusahaan Alat	,00
	Biaya Pelayanan Terminal	201.120.035,00
	Biaya Pelayanan Terminal Peti Kemas	1.819.150.579,00
	Biaya Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	97.601.409,00
	Biaya Pelayanan Kerjasama Operasi	,00
	RSP/Puskespel/Unit Kesehatan	,00
	Biaya Pelayanan Pelabuhan/Dermaga Khusus	,00
	Biaya Pelayanan Rupa-rupa Usaha	158.275.171,00
	Jumlah Biaya Operasi Langsung (D)	6.046.182.411,00
2	Biaya Operasi Tak Langsung:	
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Jasa	266.452.024,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Kepanduan	369.137.249,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Usaha Terminal	,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Terminal Peti Kemas	,00
	Jumlah Biaya Operasi Tak Langsung (E)	635.589.273,00
3	Biaya Penunjang Operasi:	
	Biaya Penunjang Operasi Divisi Tehnik	786.904.114,00
	Biaya Penunjang Operasi Divisi Keuangan	817.364.356,00
	Biaya Penunjang Operasi Kepala Cabang dan Bagian Umum	2.095.539.653,00
	Jumlah Biaya Penunjang Operasi (F)	3.699.808.123,00
	Jumlah Biaya Operasi (D+E+F) = G	10.381.579.807,00
	Laba Kotor (C-G) = H	2.168.827.493,00
III	<u>PENDAPATAN dan BIAYA DI LUAR USAHA</u>	
	Pendapatan Di Luar Usaha	1.016.757.241,00
	Biaya Di Luar Usaha	667.910.478,00
	Selisih Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha (I)	348.846.763,00
	(H+I) = J	2.517.674.256,00
IV	POS-POS LUAR BIASA	
	Pos-pos Luar Biasa (K)	487.433.018,00
V	BIAYA PENUGASAN	,00
VI	RUGI LABA USAHA	3.005.107.274,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

Tabel 8
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari-31 Desember 1999

No	URAIAN	Tahun 1999 (Rp)
1	2	3
I	<u>PENDAPATAN USAHA</u>	
	Pelayanan Jasa kapal	11.931.033.176,00
	Pelayanan Jasa Barang	1.779.584.308,00
	Pengusahaan Alat	,00
	Pelayanan Terminal	516.901.920,00
	Pelayanan Terminal Peti Kemas	4.586.927.623,00
	Pendapatan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	452.299.306,00
	Pendapatan Pelayanan Kerjasama Operasi	,00
	RSP/Puskesmas/Unit Kesehatan	,00
	Pendapatan Pelayanan Pelabuhan/Dermaga Khusus	1.380.804.016,00
	Pendapatan Pelayanan Rupa-rupa Usaha	965.961.034,00
	Jumlah Pendapatan Kotor (A)	21.613.511.383,00
	Reduksi Pendapatan (B)	6.078.417.274,00
	Jumlah Pendapatan Usaha Bersih (A-B) = C	15.535.094.109,00
II	<u>BIAYA OPERASI</u>	
1	Biaya Operasi Langsung:	
	Biaya Pelayanan Jasa Kapal	3.635.738.387,00
	Biaya Pelayanan Jasa Barang	1.293.843.552,00
	Biaya Pengusahaan Alat	,00
	Biaya Pelayanan Terminal	416.596.930,00
	Biaya Pelayanan Terminal Peti Kemas	3.231.053.328,00
	Biaya Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	144.560.361,00
	Biaya Pelayanan Kerjasama Operasi	,00
	RSP/Puskesmas/Unit Kesehatan	,00
	Biaya Pelayanan Pelabuhan/Dermaga Khusus	,00
	Biaya Pelayanan Rupa-rupa Usaha	261.591.675,00
	Jumlah Biaya Operasi Langsung (D)	8.983.384.233,00
2	Biaya Operasi Tak Langsung:	
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Jasa	356.732.844,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Kepanduan	558.890.506,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Usaha Terminal	,00
	Biaya Operasi Tak Langsung Divisi Terminal Peti Kemas	,00
	Jumlah Biaya Operasi Tak Langsung (E)	915.623.350,00
3	Biaya Penunjang Operasi:	
	Biaya Penunjang Operasi Divisi Tehnik	1.001.481.981,00
	Biaya Penunjang Operasi Divisi Keuangan	985.181.252,00
	Biaya Penunjang Operasi Kepala Cabang dan Bagian Umum	3.011.725.713,00
	Jumlah Biaya Penunjang Operasi (F)	4.998.388.946,00
	Jumlah Biaya Operasi (D+E+F) = G	14.897.396.529,00
	Laba Kotor (C-G) = H	637.697.580,00
III	<u>PENDAPATAN dan BIAYA DI LUAR USAHA</u>	
	Pendapatan Di Luar Usaha	410.196.694,00
	Biaya Di Luar Usaha	408.371.985,00
	Selisih Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha (I) (H+I) = J	1.824.709,00
	Jumlah Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha (J)	639.522.289,00
IV	<u>POS-POS LUAR BIASA</u>	
	Pos-pos Luar Biasa (K)	12.402.837,00
V	<u>BIAYA PENUGASAN</u>	,00
VI	<u>RUGI LABA USAHA</u>	651.925.126,00

Sumber: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

B. Analisis Data dan Pembahasan

Untuk dapat menjawab masalah-masalah yang dikemukakan pada BAB I, maka berikut ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dimana hasil analisis ini untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan sebelum krisis ekonomi maupun pada saat krisis ekonomi.

Adapun hasil analisis rasio terhadap laporan keuangan perusahaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang pada tahun 1995 dan 1996 (dua tahun sebelum krisis ekonomi) dan pada tahun 1998 dan 1999 (dua tahun pada saat krisis ekonomi) adalah sebagai berikut:

1. Analisis Rasio Laporan Keuangan Menurut SK. Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos dalam Neraca dan laporan Laba-Rugi baik secara individu maupun kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan SK. Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998 ini berguna untuk mengetahui atau menilai tingkat kesehatan perusahaan (BUMN), masing-masing indikator yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)
- b. Imbalan Investasi (ROI)
- c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)
- d. Rasio Lancar
- e. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)
- f. Perputaran Persediaan

- g. Perputaran Total *Asset*
- h. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

Secara khusus pembahasan metode penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi:

- Laba setelah pajak adalah laba bersih dikurangi laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain, serta saham penyertaan langsung.
- Modal sendiri seluruh komponen modal sendiri pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan tidak termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva tetap dalam pelaksanaan adalah posisi akhir tahun buku aktiva tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 9

Perhitungan Tingkat Imbalan Pada Pemegang Saham

Tahun	Modal Sendiri	Laba Setelah Pajak
1995	Rp 39.767.036.309	Rp 729.698.838
1996	Rp 40.108.761.487	Rp 826.215.098
1998	Rp 35.898.081.866	Rp 3.005.107.274
1999	Rp 53.413.278.060	Rp 651.925.126

Maka besarnya ROE untuk:

$$\text{Tahun 1995} = \frac{729.698.838}{39.767.036.309} \times 100\%$$

$$= 1,83\%$$

$$\text{Tahun 1996} = \frac{826.215.098}{40.108.761.487} \times 100\%$$

$$= 2,06\%$$

$$\text{Tahun 1998} = \frac{3.005.107.274}{35.898.081.866} \times 100\%$$

$$= 8,37\%$$

$$\text{Tahun 1999} = \frac{651.925.126}{53.413.278.060} \times 100\%$$

$$= 1,22\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat imbalan pada pemegang saham antara tahun 1995 dan 1996 (dua tahun sebelum krisis) mengalami peningkatan dan antara tahun 1998 dan 1999 (dua tahun di saat krisis) mengalami penurunan yang drastis.

b. Imbalan Investasi (ROI)

Rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi:

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain dan saham penyertaan langsung.

- Penyusutan adalah depresiasi, amortisasi dan deplesi.
- *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan (dalam penyelesaian dikurangi oleh aktiva tetap pihak ke tiga atau tidak operasional).

Tabel 10

Perhitungan Tingkat Imbalan Investasi

Tahun	EBIT	Penyusutan	<i>Capital Employed</i>
1995	Rp 729.698.838	Rp 3.169.412.248	Rp 40.496.735.247
1996	Rp 836.215.098	Rp 4.072.418.244	Rp 40.944.980.585
1998	Rp 3.005.107.274	Rp 6.308.480.122	Rp 38.903.189.240
1999	Rp 651.925.126	Rp 10.235.134.376	Rp 54.065.203.186

Maka besarnya ROI untuk:

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 1995} &= \frac{729.698.838 + 3.169.412.248}{40.496.735.247} \times 100\% \\
 &= \frac{3.899.111.086}{40.496.735.247} \times 100\% \\
 &= 0,96\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 1996} &= \frac{826.215.098 + 4.072.418.244}{40.944.980.585} \times 100\% \\
 &= \frac{4.908.633.342}{40.944.980.585} \times 100\% \\
 &= 11,99\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1998} &= \frac{3.005.107.274 + 6.308.480.122}{38.903.189.240} \times 100\% \\ &= \frac{9.313.587.396}{38.903.189.240} \times 100\% \\ &= 23,94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1999} &= \frac{651.925.126 + 10.235.134.376}{54.065.203.186} \times 100\% \\ &= \frac{10.887.059.502}{54.065.203.186} \times 100\% \\ &= 20,14\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penilaian di atas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat imbalan investasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan yang tidak begitu berarti.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rumus:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi:

- Kas, Bank, dan Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- *Current Liabilities* adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 11
Perhitungan Tingkat Rasio Kas

Tahun	Kas dan Bank	Surat Berharga Jangka Pendek	<i>Current Liabilities</i>
1995	Rp 614.238.686	-	Rp 784.408.978
1996	Rp 709.349.408	-	Rp 3.252.720.704
1998	Rp 993.537.178	-	Rp 2.164.437.717
1999	Rp 2.113.556.693	-	Rp 3.819.799.050

Maka besarnya Rasio Kas untuk:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1995} &= \frac{614.238.686}{784.408.978} \times 100\% \\ &= 78,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1996} &= \frac{709.349.408}{3.252.720.704} \times 100\% \\ &= 21,81\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1998} &= \frac{993.537.178}{2.164.437.717} \times 100\% \\ &= 45,90\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1999} &= \frac{2.113.556.693}{3.819.799.050} \times 100\% \\ &= 55,33\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat rasio kas dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup drastis dan berangsur-angsur terjadi kenaikan.

Pada tahun 1995 besarnya tingkat rasio kas sebesar 78,31%. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar 78,31% atau setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,783.

Sedangkan pada tahun 1996 besarnya tingkat rasio kas mengalami penurunan yang cukup drastis bila dibandingkan tahun 1995 yaitu 21,81%. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia di dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar 21,81%. Atau setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar 0,218.

Pada tahun 1998 besarnya tingkat rasio kas mengalami kenaikan bila dibanding tahun 1996 yaitu 45,90%. Artinya setiap utang lancar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,459.

Kemudian pada tahun 1999 besarnya tingkat rasio kas mengalami kenaikan kembali bila dibanding tahun 1998 yaitu 55,33%. Hal ini berarti setiap utang lancar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,553.

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rumus:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi:

- *Current Asset* adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku.
- *Current Liabilities* adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 12

Daftar Tingkat Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Tahun	<i>Current Asset</i>	<i>Current Liabilities</i>
1995	Rp 1.763.497.366	Rp 784.408.978
1996	Rp 2.563.182.775	Rp 3.252.720.704
1998	Rp 2.949.263.080	Rp 2.164.437.717
1999	Rp 4.093.612.179	Rp 3.819.799.050

Maka besarnya Tingkat Rasio Lancar untuk :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1995} &= \frac{1.763.497.366}{784.408.978} \times 100\% \\ &= 222,82\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1996} &= \frac{2.563.182.775}{3.252.720.704} \times 100\% \\ &= 78,80\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1998} &= \frac{2.949.263.080}{2.164.437.717} \times 100\% \\ &= 136,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1999} &= \frac{4.093.612.179}{3.819.799.050} \times 100\% \\ &= 107,11\% \end{aligned}$$



Dari perhitungan di atas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat rasio lancar atau tingkat likuiditasnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 1995 tingkat rasio lancarnya cukup fantastis yaitu sebesar 222,82% dan mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun berikutnya. Tetapi pada tahun 1998 mengalami kenaikan yang cukup berarti pula.

e. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

Rumus:

$$Collection\ Periods = \frac{Total\ Piutang\ Usaha}{Total\ Pendapatan\ Usaha} \times 365\ hari$$

Definisi:

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan

Tabel 13

Daftar Tingkat Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

Tahun	Total Piutang Usaha	Total Pendapatan Usaha
1995	Rp 550.822.576	Rp 10.327.344.812
1996	Rp 591.486.347	Rp 11.297.549.737
1998	Rp 901.932.777	Rp 12.550.407.300
1999	Rp 900.795.589	Rp 15.535.094.109

Maka besarnya Perputaran Piutang untuk:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1995} &= \frac{550.822.576}{10.327.344.812} \times 365 \text{ hari} \\ &= 19,47 \approx 19 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1996} &= \frac{591.486.347}{11.297.549.737} \times 365 \text{ hari} \\ &= 19,11 \approx 19 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1998} &= \frac{901.932.777}{12.550.407.300} \times 365 \text{ hari} \\ &= 26,23 \approx 26 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1999} &= \frac{900.795.589}{15.535.094.109} \times 365 \text{ hari} \\ &= 21,16 \approx 21 \text{ hari} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat *Collection Periods* mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak begitu berarti.

f. Perputaran Persediaan

Rumus:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi:

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 14

Daftar Tingkat Perputaran Persediaan

Tahun	Total Persediaan	Total Pendapatan Usaha
1995	Rp 112.852.663	Rp 10.327.344.812
1996	Rp 127.679.472	Rp 11.297.549.737
1998	Rp 122.409.117	Rp 12.550.407.300
1999	Rp 119.498.822	Rp 15.535.094.109

Maka besarnya Tingkat Perputaran Persediaan untuk:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1995} &= \frac{112.852.663}{10.327.344.812} \times 365 \text{ hari} \\ &= 3,99 \approx 4 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1996} &= \frac{127.679.472}{11.297.549.737} \times 365 \text{ hari} \\ &= 4,13 \approx 4 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1998} &= \frac{122.409.717}{12.550.407.300} \times 365 \text{ hari} \\ &= 3,56 \approx 4 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1999} &= \frac{119.498.822}{15.535.094.109} \times 365 \text{ hari} \\ &= 2,81 \approx 3 \text{ hari} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat tidak terjadi perubahan-perubahan tingkat perputaran persediaan dalam tahun-tahun tersebut di atas.

g. Perputaran Total Asset (*Total Asset Turnover*)

Rumus:

$$\text{Perputaran Total Asset} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi:

- Total Pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap.
- *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 15

Daftar Perputaran Total Asset (*Total Asset Turnover*)

Tahun	Total Pendapatan	<i>Capital Employed</i>
1995	Rp 10.409.445.236	Rp 40.496.735.247
1996	Rp 11.443.520.440	Rp 40.944.980.585
1998	Rp 13.567.164.541	Rp 38.903.189.240
1999	Rp 15.945.290.803	Rp 54.065.203.186

Maka besarnya Perputaran Total Asset untuk:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1995} &= \frac{10.409.445.236}{40.496.735.247} \times 100\% \\ &= 25,70\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 1996} &= \frac{11.443.520.440}{40.944.980.585} \times 100\% \\ &= 27,95\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 1998} &= \frac{13.567.164.541}{38.903.189.240} \times 100\% \\ &= 34,87\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 1999} &= \frac{15.945.290.803}{54.065.203.186} \times 100\% \\ &= 29,49\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat perputaran total asset mengalami peningkatan dan penurunan.

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Rumus:

$$\text{Rasio total modal sendiri terhadap total asset} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi:

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 16

Daftar Tingkat Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Tahun	Total Modal Sendiri	Total Asset
1995	Rp 39.767.036.309	Rp 40.523.274.338
1996	Rp 40.108.761.487	Rp 42.282.178.165
1998	Rp 35.898.081.866	Rp 38.919.946.240
1999	Rp 53.413.278.060	Rp 54.081.960.186

Maka besarnya Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset untuk:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1995} &= \frac{39.767.036.309}{40.523.274.338} \times 100\% \\ &= 98,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1996} &= \frac{40.108.761.487}{42.282.178.165} \times 100\% \\ &= 94,86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1998} &= \frac{35.898.081.866}{38.919.946.240} \times 100\% \\ &= 92,24\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 1999} &= \frac{53.413.278.060}{54.081.960.186} \times 100\% \\ &= 98,76\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat perubahan-perubahan rasio total modal sendiri terhadap total asset dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan kenaikan kembali.

2. Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Perusahaan

Dalam penilaian kinerja perusahaan ini, yang menjadi acuan adalah tingkat kesehatan perusahaan. Setelah penulis menentukan besarnya nilai atau bobot dari masing-masing indikator, kemudian dapat dicocokkan dengan bobot yang menjadi standar acuan dari masing-masing indikator yang terdapat pada SK Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998.

Adapun standar maksimal untuk masing-masing bobot dalam indikator tersebut sebagai berikut:

- ~ Imbalan kepada pemegang saham (ROE), mempunyai bobot maksimal sebesar 15.
- ~ Imbalan investasi (ROI), mempunyai bobot maksimal sebesar 10.
- ~ Rasio kas (*Cash Ratio*), mempunyai bobot maksimal sebesar 3.
- ~ Rasio lancar (*Current Ratio*), mempunyai bobot maksimal sebesar 4.
- ~ *Collection periods*, mempunyai bobot maksimal sebesar 4.
- ~ Perputaran persediaan, mempunyai bobot maksimal sebesar 4.
- ~ Perputaran total asset (TATO), mempunyai bobot maksimal sebesar 4.
- ~ Rasio total modal sendiri terhadap total asset, mempunyai bobot maksimal sebesar 10.

Tetapi oleh karena yang akan diperbandingkan adalah tingkat kesehatan finansial perusahaan sebelum dan di saat krisis ekonomi maka hasil perhitungan pada analisis pertama harus dirata-rata sesuai dengan masanya, yaitu: masa sebelum krisis ekonomi (1995-1996) dan masa pada saat krisis ekonomi (1998-1999). Maka berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 17

Daftar hasil perhitungan dari masing-masing indikator dan rata-ratanya

a	b 1995	c 1996	d rata-rata $\frac{b+c}{2}$	e 1998	f 1999	g rata-rata $\frac{e+f}{2}$
a. ROE	1,83%	2,06%	1,945%	8,37%	1,22%	4,795%
b. ROI	0,96%	11,99%	6,475%	23,94%	20,14%	22,04%
c. Rasio kas	78,31%	21,81%	50,06%	45,90%	55,33%	50,62%
d. Rasio lancar	222,82%	78,80%	150,81%	136,3%	107,1%	121,7%
e. <i>Collection periods</i>	19,47 hr	19,11 hr	19,29 hr	26,23 hr	21,16 hr	23,69 hr
f. Perputaran persediaan	3,99 hr	4,13 hr	4,06 hr	3,56 hr	2,81 hr	3,19 hr
g. Perputaran total asset	25,70%	27,95%	26,825%	34,87%	29,49%	32,18%
h. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	98,13%	94,86%	96,495%	92,24%	98,76%	95,5%

Dari perhitungan di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

- Untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) diperoleh hasil rata-rata sebesar 1,945%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 3.
- Untuk saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) diperoleh hasil rata-rata sebesar 4,795 %, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 5.

b. Imbalan Investasi (ROI)

- Untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) diperoleh hasil rata-rata sebesar 6,475%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 3,5.
- Untuk saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) diperoleh hasil rata-rata sebesar 22,04%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 10.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

- Untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) diperoleh hasil rata-rata sebesar 50,06%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 3.
- Untuk saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) diperoleh hasil rata-rata sebesar 50,615%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 3.

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

- Untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) diperoleh hasil rata-rata sebesar 150,81%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 3.
- Untuk saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) diperoleh hasil rata-rata sebesar 121,685%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 2,5.

e. *Collection Periods*

- Untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) diperoleh hasil rata-rata sebesar 19,29 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 4.
- Untuk saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) diperoleh hasil rata-rata sebesar 23,695 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 4.

f. Perputaran Persediaan

- Untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) diperoleh hasil rata-rata sebesar 4,06 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 4.

- Untuk saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) diperoleh hasil rata-rata sebesar 3,185 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 4.

g. Perputaran Total Asset (TATO)

- Untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) diperoleh hasil rata-rata sebesar 26,825%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 1.
- Untuk saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) diperoleh hasil rata-rata sebesar 32,18%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 1.

h. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva

- Untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) diperoleh hasil rata-rata sebesar 96,495%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 3,5.
- Untuk saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) diperoleh hasil rata-rata sebesar 95,50%, berdasarkan daftar skor menurut SK. Menteri Keuangan sebesar 3,5.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan penulis, maka kinerja dari PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II Cabang Palembang adalah seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 18

Daftar Kinerja PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II

Cabang Palembang

Indikator	Sebelum Krisis Ekonomi (1995 dan 1996)	Saat Krisis Ekonomi (1998 dan 1999)
a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (Roe)	3	5
b. Imbalan Investasi (ROI)	3,5	10
c. Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	3	3
d. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	3	2,5
e. <i>Collection Periods</i>	4	4
f. Perputaran Persediaan	4	4
g. Perputaran Total Asset	1	1
h. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	3,5	3,5
Total	25	33

Tabel ini menunjukkan skor-skor yang diperoleh masing-masing indikator mencerminkan tingkat kinerja PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang pada saat krisis ekonomi lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi.

Untuk menjawab masalah-masalah seperti yang diutarakan pada BAB I, maka berikut ini merupakan pembahasan yang diperoleh dari hasil analisis data.

1. Analisis Rasio Laporan Keuangan menurut SK. Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

Berdasarkan perhitungan di muka dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat imbalan pada pemegang saham. Pada tahun 1995 diketahui besarnya tingkat imbalan pada pemegang saham sebesar 1,83%.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 0,0183. Artinya setiap Rp1,00 modal sendiri dapat menghasilkan keuntungan netto Rp 0,0183 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan biasa.

Pada tahun 1996 besarnya tingkat imbalan pada pemegang saham mengalami peningkatan sebesar 0,23%, sehingga tingkat imbalan pada pemegang saham tahun 1996 menjadi 2,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 0,0206. Artinya setiap Rp 1,00 modal sendiri dapat menghasilkan keuntungan netto Rp 0,0206 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan biasa.

Pada tahun 1998 (saat terjadinya krisis ekonomi) tingkat imbalan pada pemegang saham malah mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,31%, sehingga tingkat imbalan pada pemegang saham tahun 1998 menjadi 8,37%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 0,0837. Artinya setiap Rp 1,00 modal sendiri dapat menghasilkan keuntungan netto Rp 0,0837 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan biasa.

Sedangkan pada tahun 1999 tingkat imbalan pada pemegang saham kembali mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu sebesar 7,15%, sehingga menjadi 1,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan sebesar 0,0122. Artinya setiap Rp 1,00 modal sendiri dapat menghasilkan keuntungan netto sebesar 0,0122 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan biasa.

b. Imbalan Investasi (ROI)

Pada tahun 1995 (sebelum terjadinya krisis ekonomi) tingkat imbalan investasi sebesar 0,96%. Hal ini berarti bahwa kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan adalah sebesar 0,0096.

Pada tahun 1996 tingkat imbalan investasi mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu sebesar 11,03%, sehingga menjadi 11,99%. Peningkatan yang cukup berarti ini dipengaruhi oleh naiknya EBIT dan penyusutan yang cukup tinggi sedangkan *capital employed* mengalami peningkatan yang tidak begitu berarti.

Sedangkan pada tahun 1998 (saat terjadinya krisis ekonomi) tingkat imbalan investasi mengalami peningkatan kembali, yaitu sebesar 11,95%, sehingga tingkat imbalan investasi tahun 1998 menjadi 23,94%. Peningkatan yang cukup tinggi ini juga dipengaruhi oleh naiknya EBIT dan penyusutan sedangkan *capital employed* mengalami penurunan.

Kemudian pada tahun 1999 tingkat imbalan investasi mengalami penurunan yang tidak begitu berarti, yaitu sebesar 3,80%, sehingga menjadi 20,14%. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya EBIT dan naiknya *capital employed* sebagai faktor pembagi tetapi masih ditolong oleh meningkatnya penyusutan.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Pada tahun 1995 besarnya tingkat rasio kas sebesar 78,31%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar 78,31%. Artinya setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,7831.

Sedangkan tahun 1996 besarnya tingkat rasio kas sebesar 21,81%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup drastis, yaitu sebesar 56,50%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya utang lancar yang cukup tinggi tetapi hanya dibarengi dengan meningkatnya kas dan bank yang tidak begitu berarti.

Pada tahun 1998 (saat terjadinya krisis ekonomi) besarnya tingkat rasio kas berangsur-angsur naik kembali menjadi 45,90%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kas dan bank yang lumayan berarti, dan turunnya utang lancar sebagai faktor pembagi.

Kemudian pada tahun 1999 besarnya tingkat rasio kas mengalami kenaikan kembali meskipun tidak seperti yang dicapai pada tahun 1995 yaitu menjadi 55,33%. Yang berarti setiap utang lancar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,5533.

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Pada tahun 1995 besarnya rasio lancar sebesar 222,82%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hutang lancar perusahaan sebesar Rp 1,00 dijamin dengan aktiva lancar perusahaan sebesar Rp 2,2282 atau 2X lipat lebih. Dengan demikian perusahaan ini sangat likuid, sebab perusahaan mampu melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva yang ada.

Tetapi lain halnya dengan tahun 1996, pada tahun ini tingkat rasio lancarnya mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 78,80%. Artinya perusahaan ini hanya mampu menjamin setiap Rp 1,00. Hutang lancarnya dengan aktiva lancar perusahaan sebesar Rp 0,7880.

Sedangkan pada tahun 1998 besarnya tingkat rasio lancar meningkat menjadi 136,26%. Artinya perusahaan ini mampu kembali melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva lancar yang ada.

Kemudian pada tahun 1998 besarnya tingkat rasio lancar turun kembali, meskipun semua hutang lancarnya juga dapat dilunasi dengan aktiva lancar yang ada, yaitu menjadi 107,11%.

e. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

Pada tahun 1995 besarnya tingkat *collection periods* sebesar 19 hari. Hal ini berarti periode yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang setiap 19 hari sekali.

Pada tahun 1996 nampaknya perusahaan ini tidak mengalami perubahan dalam tingkat *collection periods* yaitu sebesar 19 hari.

Sedangkan untuk tahun 1998 perusahaan ini mengalami penurunan lebih kurang 35% dalam tingkat *collection periods*. Perusahaan ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan piutangnya yaitu setiap 26 hari sekali.

Kemudian pada tahun 1999 perusahaan ini mengalami peningkatan kembali dalam tingkat *collection periods*, meskipun tidak seperti tahun 1995 dan 1996, yaitu perusahaan harus membutuhkan waktu 21 hari sekali untuk mengumpulkan piutangnya.

f. Perputaran Persediaan.

Pada tahun 1995, 1996 dan 1998 besarnya tingkat perputaran persediaan adalah sama yaitu 4 hari. Artinya periode yang dibutuhkan untuk mengolah persediaannya relatif pendek, yaitu hanya 4 hari.

Sedangkan pada tahun 1999 besarnya tingkat perputaran persediaan meningkat menjadi 3 hari. Artinya perusahaan ini lebih pendek waktunya untuk mengolah persediaannya sampai jasa itu laku dijual.

g. Perputaran Total Asset.

Pada tahun 1995 perputaran total asset sebesar 0,2570 kali atau 25,7%. Hal ini berarti kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam tahun 1995 atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue adalah 0,2570 kali atau 25,70 %. Artinya setiap Rp 1,00 aktiva selama setahun dapat menghasilkan revenue sebesar Rp 0,2570.

Untuk tahun 1996 perputaran total asset mengalami peningkatan sebesar 2,25%, yaitu menjadi 27,95%. Artinya setiap Rp 1,00 aktiva selama setahun dapat menghasilkan revenue sebesar Rp 0,2795.

Sedangkan pada tahun 1998 perputaran total asset mengalami peningkatan kembali sebesar 6,92%, yaitu menjadi 34,87%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya total pendapatan dan dibarengi oleh turunnya *capital employed* sebagai faktor pembagi.

Untuk tahun 1999 perputaran total asset mengalami penurunan sebesar 5,38%, yaitu menjadi 29,49%. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat *capital employed* sebagai faktor pembagi dan tidak dapat ditolong oleh meningkatnya total pendapatan.

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset

Pada tahun 1995 besarnya tingkat rasio total modal sendiri terhadap total asset sebesar 98,13%. Artinya dari total asset yang ada di perusahaan ini 98,13%nya merupakan modal sendiri.

Pada tahun 1996 besarnya tingkat rasio total modal sendiri terhadap total asset mengalami penurunan sebesar 3,27%, yaitu menjadi 94,86%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya total asset sebagai faktor pembagi, yang tidak sepadan dengan meningkatnya total modal sendiri yang relatif lebih sedikit.

Sedangkan pada tahun 1998 besarnya tingkat rasio total modal sendiri terhadap total asset mengalami penurunan kembali, yaitu menjadi 92,24%. Hal ini disebabkan oleh turunnya tingkat total modal sendiri yang tidak sepadan juga dengan turunnya tingkat total asset.

Kemudian pada tahun 1999 besarnya tingkat rasio total modal sendiri terhadap total asset mengalami kenaikan kembali menjadi 98,76%. Artinya dari total asset yang ada di perusahaan ini hampir semuanya merupakan modal sendiri, tepatnya 98,76% adalah modal sendiri.

2. Penilaian Kinerja Berdasarkan SK. Menteri Keuangan yang Diukur Melalui Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan.

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

Menurut hasil perhitungan besarnya skor berdasarkan SK. Menteri Keuangan untuk tahun 1995 dan 1996 (sebelum terjadinya krisis ekonomi) sebesar 3 sedangkan untuk tahun 1998 dan 1999 (saat terjadinya krisis ekonomi) sebesar 5 dengan skor maksimal 15. Bila dilihat atau dibandingkan, nampaknya terjadi perbedaan. Tetapi bila dibandingkan secara seksama, perbedaannya tidak begitu mencolok. Besarnya skor antara ROE 1995 dan 1996 (sebelum terjadinya krisis ekonomi) dengan ROE 1998 dan 1999 (saat terjadinya krisis ekonomi) sama-sama berada dalam level yang cukup bawah. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan hasil tingkat ROE yang kurang baik. Baik itu di saat krisis ekonomi maupun sebelum krisis ekonomi berlangsung.

b. Imbalan Investasi (ROI)

Lain halnya dengan tingkat ROI. Jika tingkat ROE tidak terjadi perbedaan yang begitu mencolok antara di saat krisis ekonomi dengan sebelum krisis ekonomi.

Untuk tingkat ROI terjadi perbedaan skor yang begitu mencolok. Untuk tahun 1995 dan 1996 (sebelum terjadinya krisis ekonomi) berada dalam satu level yang kurang bagus, yaitu sebesar 3,5 sedangkan untuk tahun 1998 dan 1999 (saat terjadinya krisis ekonomi) malah terjadi hasil yang cukup memuaskan.

Tingkat ROI pada waktu itu berada dalam level yang paling atas atau maksimal yaitu dengan skor 10. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan laba sebelum pajak dan tingkat penyusutan yang cukup tinggi serta penurunan *caital employed* yang cukup drastis.

c. Rasio Kas

Untuk tingkat rasio kas besarnya skor pada tahun 1995 dan 1996 (sebelum terjadinya krisis ekonomi) serta pada tahun 1998 dan 1999 (saat terjadinya krisis ekonomi) benar-benar tidak terjadi perbedaan skor keduanya adalah sama, yaitu sebesar 3. Keduanya berada dalam level tingkat atas karena mencapai skor maksimal.

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Sama halnya dengan tingkat ROE. Untuk tingkat rasio lancar nampaknya terjadi perbedaan, tetapi perbedaannya tidak begitu mencolok. Skor untuk tahun 1995 dan 1996 (sebelum terjadinya krisis ekonomi) sebesar 3 sedangkan untuk tahun 1998 dan 1999 (saat terjadinya krisis ekonomi) turun 0,5 point yaitu menjadi 2,5. Keduanya berada dalam level atas karena untuk tingkat rasio lancar skor maksimalnya adalah 3.

e. *Collection Periods*

Untuk skor *collection periods* pada tahun 1995 dan 1996 (sebelum terjadinya krisis ekonomi) adalah sebesar 4. Begitupun juga dengan tahun 1998 dan 1999 (saat terjadinya krisis ekonomi). Keduanya berada dalam level yang paling atas atau dengan kata lain keduanya memperoleh nilai maksimal.

f. Perputaran Persediaan

Sama halnya dengan skor untuk *collection periods*. Besarnya skor perputaran persediaan untuk tahun 1995 dan 1996 serta tahun 1998 dan 1999 adalah sama. Keduanya mendapatkan skor maksimal yaitu 4.

g. Perputaran Total Asset

Untuk perputaran total asset nampaknya juga tidak terjadi perbedaan skor antara tahun 1995 dan 1996 dengan tahun 1998 dan 1999. Tetapi untuk tingkat perputaran total asset, skor yang didapat berada dalam level bawah, yaitu sebesar 1, dengan skor maksimal 4.

h. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset.

Lagi-lagi tidak terjadi perbedaan skor antara saat terjadinya krisis ekonomi dengan sebelum terjadinya krisis ekonomi. Untuk tingkat rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 3,5. Artinya keduanya berada dalam level tengah, karena rasio modal sendiri terhadap total asset memiliki skor maksimal 6.

Sedangkan untuk permasalahan kedua, berdasarkan hasil analisis permasalahan pertama kita dapat melihat adanya perbedaan atau kesamaan tingkat kesehatan keuangan PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang pada saat krisis ekonomi dan sebelum krisis ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan atau kesamaan tingkat kesehatan *finansial* tersebut adalah:

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

Untuk indikator ini tingkat kesehatan ROE di saat krisis dapat dikatakan lebih baik daripada sebelum krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh naiknya nilai ROE pada tahun 1998 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini diakibatkan oleh meningkatnya laba setelah pajak dan turunnya modal sendiri. Sedangkan kenaikan laba setelah pajak diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan usaha perusahaan.

Peningkatan pendapatan usaha perusahaan ini dipengaruhi oleh adanya kesempatan bagi perusahaan untuk mengubah segmen pasar. Dengan adanya krisis ekonomi, maka bisnis di dalam negeri menjadi lesu. Sebaliknya bisnis ke luar negeri (eksport) mengalami peningkatan. Oleh karena itu perusahaan memperoleh kesempatan untuk mengubah segmen pasarnya. Dahulu sebelum krisis ekonomi terjadi, perusahaan banyak melayani jasa kepelabuhanan bagi pedagang-pedagang antar pulau dan antar propinsi dalam negeri, tetapi di saat krisis ekonomi terjadi, perusahaan lebih memfokuskan pada pelayanan jasa kepelabuhanan bagi para eksportir dalam rangka mengirim barang ke luar negeri.

Untuk mendukung pelayanan perusahaan PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang juga berusaha meningkatkan kualitas produk jasanya dengan membangun sistem komputerisasi dalam menunjang sistem administrasi pelayanan operasional bongkar muat peti kemas untuk ekspor dan penambahan alat-alat berupa *bop loader* dan *super stacker* guna mendukung bongkar muat di pelabuhan. Untuk mendukung pengoperasian alat ini, perusahaan membekali pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh kantor pusat maupun kantor cabang Palembang.

b. Imbalan Investasi (ROI)

Sama halnya dengan ROE, untuk tingkat imbalan investasi (ROI) pada saat krisis ekonomi juga dapat dikatakan lebih sehat. Bahkan dapat dikatakan sehat sekali, karena mencapai skor maksimal 10. Peningkatan ROI di saat krisis ekonomi ini diakibatkan oleh langkah perusahaan dalam meningkatkan laba operasinya yaitu dengan usaha meningkatkan efisiensi di sektor penjualan dan administrasi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya laba operasi perusahaan dan stabilnya tingkat perputaran aktiva. Dengan stabilnya tingkat perputaran aktiva ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak meningkatkan ROInya dengan kebijaksanaan investasi dana melainkan dengan usahanya meningkatkan efisiensi.

Sedangkan peningkatan penyusutan ini sebagai akibat langkah-langkah perusahaan untuk menjual mesin-mesin yang sudah tidak produktif lagi untuk digantikan dengan mesin-mesin baru yang dapat memperlancar proses operasional perusahaan.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Sedangkan untuk rasio kas perusahaan ini mengalami kestabilan hasil. Artinya nilai yang dihasilkan untuk rasio ini adalah sama, baik itu di saat krisis ekonomi maupun sebelumnya. Kenaikan antara kas dan bank serta hutang lancarnya dari tahun ke tahun selalu seimbang, akibatnya nilai yang dihasilkan rasio ini pada saat krisis ekonomi maupun sebelumnya adalah sama. Hal ini disebabkan kebijakan perusahaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan perusahaan pada saat krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi ini tentunya harga barang-barang untuk operasi perusahaan menjadi naik. Oleh karena itu perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan kas dan bank.

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Sama halnya dengan rasio kas, rasio lancar pun menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan rasio tersebut. Tetapi perbedaannya untuk sebelum krisis lebih sehat sedikit bila dibandingkan dengan di saat krisis ekonomi, yaitu terpaut 0,5 poin meskipun dapat dikatakan sehat semua.

Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai *current asset* (aktiva lancar) yang melebihi nilai *current liabilities* (utang lancar). Kenaikan aktiva lancar ini sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan usaha perusahaan sedangkan peningkatan utang lancarnya dipengaruhi oleh meningkatnya harga barang-barang untuk operasi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan melakukan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan aktiva lancarnya.

e. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

Untuk rasio ini skor yang dihasilkan juga sama. Dengan adanya krisis ekonomi ini, nampaknya perusahaan lebih agresif dalam mengumpulkan piutang-piutangnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Perputaran piutang yang relatif cepat ini juga disebabkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan kebijakan kreditnya. Adapun kebijakan kredit yang dilakukan PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang ini, antara lain:

1. Seleksi terhadap calon debitur.
2. Penentuan jangka kredit.
3. Pemberian potongan harga (*discount*) bagi pembayaran kredit yang lebih awal.
4. Konfirmasi dengan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada para debitur yang menunggak.
5. Kerjasama dengan instansi yang terkait untuk melakukan penagihan piutang kepada debitur-debitur yang masih menunggak.

f. Perputaran Persediaan

Demikian juga dengan perputaran persediaan, untuk rasio ini tidak terjadi pengaruh negatif dengan terjadinya krisis ekonomi. Hal ini terbukti dengan terjadinya kesamaan hasil yang dicapai antara di saat krisis dengan sebelum krisis ekonomi. Keduanya berada dalam level atas, dengan mencapai skor maksimal.

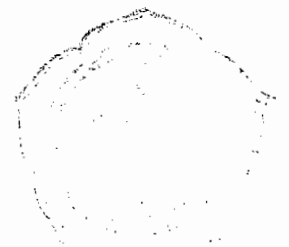
Hal ini disebabkan karena komposisi antara persediaan dan pendapatan usahanya meningkat secara seimbang. Akibatnya hasil yang didapatkan dari perbandingan keduanya pun sama atau seimbang.

Selain itu dengan semakin canggihnya sistem komputerisasi PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang. Perusahaan ini mampu meramalkan ataupun menentukan persediaannya sehingga dapat melayani semua kebutuhan konsumennya. Perputaran persediaan yang relatif cepat ini juga dipengaruhi dengan adanya pembentukan tim kerja Pemasaran dan Penjualan yang bertugas menyusun daftar kuesioner dan rencana atau program kerja untuk kegiatan survey pangsa pasar.

g. Perputaran Total Aset

Sedangkan untuk perputaran total aset kondisinya adalah sama, baik di saat krisis maupun sebelum krisis ekonomi, yaitu sama-sama berada dalam level bawah. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai *capital employed* sebagai faktor pembagi bila dibandingkan peningkatan pendapatan. Akibatnya hasil yang didapatkan dari perbandingan keduanya pun sangat kecil.

Perputaran total aset yang relatif lambat ini disebabkan oleh tingginya nilai aktiva tetap yang sudah menjadi ciri khas perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, akibatnya peningkatan penjualan pun tidak dapat meningkatkan perputaran total asetnya.



h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Seperti halnya dengan beberapa rasio yang lain, rasio ini juga sama kondisinya di saat krisis dengan sebelum krisis ekonomi. Keadaan ini disebabkan oleh terlalu tingginya komposisi antara modal sendiri dengan *total asset*. Untuk mendapatkan skor yang tinggi, rasio ini harus mempunyai komposisi modal sendiri minimal 30% dan maksimal 40% terhadap komposisi aktivasinya. Sedangkan kenyataan yang terjadi dari tahun ke tahun komposisi modal sendirinya tidak pernah berubah, yaitu 90%. Oleh karena itu perlu dilakukan tambahan aset dengan modal sendiri.

Dengan demikian peningkatan ROE dan ROI serta stabilnya keenam indikator yang lain, yaitu rasio kas, rasio lancar, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran total aset dan rasio total modal sendiri terhadap total aset menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II tidak terpengaruh negatif dengan adanya krisis ekonomi melainkan ada pengaruh yang positif. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya tingkat kesehatan perusahaan pada saat krisis ekonomi bila dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data keuangan PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Bahwa tingkat kesehatan finansial PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang di saat krisis ekonomi berbeda bila dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi. Dalam hal ini, kinerja perusahaan pada saat krisis ekonomi lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi. Adapun secara spesifik daftar kinerja PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang yang mencerminkan tingkat kesehatan finansial perusahaan itu, adalah sebagai berikut:

Indikator	Sebelum Krisis Ekonomi (1995 dan 1996)	Saat Krisis Ekonomi (1998 dan 1999)
a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (Roe)	3	5
b. Imbalan Investasi (ROI)	3,5	10
c. Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	3	3
d. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	3	2,5
e. <i>Collection Periods</i>	4	4
f. Perputaran Persediaan	4	4
g. Perputaran Total Asset	1	1
h. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	3,5	3,5
Total	25	33

2. Faktor-faktor yang menyebabkan lebih baiknya tingkat kesehatan finansial perusahaan di saat krisis ekonomi bila dibandingkan sebelum krisis ekonomi adalah:

a. Peningkatan ROE

Peningkatan ROE ini disebabkan oleh naiknya nilai ROE pada tahun 1998 bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini diakibatkan oleh meningkatnya laba setelah pajak dan turunnya modal sendiri. Sedangkan kenaikan laba setelah pajak diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan usaha perusahaan. Peningkatan pendapatan usaha perusahaan ini dipengaruhi oleh adanya kesempatan bagi perusahaan untuk mengubah segmen pasar. Dengan adanya krisis ekonomi, maka bisnis di dalam negeri menjadi lesu. Sebaliknya bisnis ke luar negeri (ekspor) mengalami peningkatan. Oleh karena itu perusahaan memperoleh kesempatan untuk mengubah segmen pasarnya. Dahulu sebelum krisis ekonomi terjadi, perusahaan banyak melayani jasa kepelabuhan bagi pedagang-pedagang antar pulau dan antar propinsi dalam negeri, tetapi di saat krisis ekonomi terjadi, perusahaan lebih memfokuskan pada pelayanan jasa kepelabuhan bagi para eksportir dalam rangka mengirim barang ke luar negeri.

Untuk mendukung pelayanan perusahaan PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang juga berusaha meningkatkan kualitas produk jasanya dengan membangun sistem komputerisasi dalam menunjang sistem administrasi pelayanan operasional bongkar muat peti kemas untuk ekspor dan penambahan alat-alat berupa *bop loader* dan *super stacker* guna mendukung bongkar muat di pelabuhan.

Untuk mendukung pengoperasian alat ini, perusahaan membekali pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh kantor pusat maupun kantor cabang Palembang.

b. Peningkatan ROI

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan ROI ini adalah peningkatan laba operasi perusahaan sebagai akibat dari peningkatan efisiensi di sektor penjualan dan administrasi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya laba operasi perusahaan dan stabilnya tingkat perputaran aktivasnya. Dengan stabilnya tingkat perputaran aktiva ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak meningkatkan ROInya dengan kebijaksanaan investasi dana melainkan dengan kebijakan efisiensi di sektor penjualan dan administrasi.

c. Stabilnya Keenam Indikator Kesehatan Finansial Lainnya (rasio kas, rasio lancar, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran total aset, dan rasio total modal sendiri terhadap total aset)

Dengan stabilnya keenam indikator tersebut, maka dengan peningkatan ROE dan ROI ini sudah dapat meningkatkan tingkat kesehatan finansial perusahaan di saat krisis ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan beberapa kesimpulan yang telah diambil, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk jangka pendek, minimal PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II harus mampu mempertahankan prestasi yang telah dicapainya, yaitu harus tetap mampu mempertahankan tingkat kinerjanya agar tetap lebih baik daripada sebelum krisis ekonomi. Sehingga dapat terus beroperasi dan bersaing dengan perusahaan lain.
2. Untuk jangka panjang, pihak manajer harus mampu mempertahankan sikap-sikap mental dalam menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi perekonomian yang sedang berlangsung.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan laporan keuangan dua periode akuntansi yaitu untuk sebelum krisis ekonomi (1995 dan 1996) dan dua periode akuntansi untuk di saat krisis ekonomi (1998 dan 1999) karena memang baru data itu yang tersedia. Sehingga dalam penelitian ini tidak digunakan uji statistik untuk mengetahui perbedaannya karena jumlah observasinya hanya dua periode akuntansi sebelum krisis ekonomi dan dua periode akuntansi setelah krisis ekonomi. Oleh karena itu keakuratan analisis ini menjadi rendah.
2. Oleh karena krisis ekonomi ini tidak hanya terjadi pada tahun 1998 dan 1999, maka untuk tahun-tahun berikutnya masih perlu dilakukan penelitian lagi, karena ada kemungkinan dengan semakin berkurangnya krisis dapat menyebabkan kinerja perusahaan berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, 1995, *BUMN Swasta dan Koperasi*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Charles, J, Woetfeel, 1995, *Financial Statement Analysis*, (Penerjemah Abdi Tanjung), Jakarta: Erlangga.
- Husnan, Suad, 1992, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapannya*, Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 1995, *Standar Akuntansi Keuangan*, Buku Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan No.740/KMK.00/1989, Tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Perusahaan (BUMN).
- Keputusan Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.00/1989.
- Keputusan Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
- Munawir, S, 1998, *Analisa Rasio Keuangan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Raharjo, Budi, 1994, *Memahami Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Riyanto, Bambang, 1995, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi III, Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
- Spillane, J.J, 1997, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis dan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Stickney, Clyde, P, 1996, *Financial Reporting and Statement Analysis*, For Worth: Harcourt Brase College Publishes.
- Tarmidi, Lepi T, 1999, Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 1, No.4, Hal: 17-22

LAMPIRAN

Lampiran 1:**PEDOMAN WAWANCARA****I. Gambaran Umum Perusahaan.****A. Pendirian Perusahaan.**

1. Kapan perusahaan didirikan?
2. Apakah yang mendorong pendirian perusahaan?
3. Dalam bidang apa perusahaan beroperasi?
4. Berapakah nomor akta pendirian perusahaan?

B. Lokasi Perusahaan.

1. Dimana perusahaan didirikan?
2. Berapa luas tanah yang digunakan untuk mendirikan perusahaan?

II. Personalia.**A. Masalah Tenaga Kerja.**

1. Berapakah jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap di perusahaan ini?
2. Berapa tenaga kerja pria dan wanita?
3. Berapa hari karyawan bekerja dalam 1 minggu?
4. Berapa lama jam kerja karyawan dalam sehari?
5. Apakah karyawan diberikan cuti dalam bekerja?

B. Struktur Organisasi.

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan?
2. Bagaimana tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian dalam organisasi?

C. Administrasi.

1. Bagaimana sistem gaji yang digunakan?

2. Berapa gaji lembur yang diberikan bila karyawan melakukan lembur?

D. Fasilitas-fasilitas.

1. Tunjangan apa saja yang diberikan perusahaan?

2. Apakah usaha perusahaan agar karyawan giat dalam bekerja?

III. Pemasaran.

1. Apakah produk dari perusahaan?

2. Siapakah konsumen utama?

3. Apakah ada usaha promosi dari perusahaan?

Lampiran 2:**PEDOMAN OBSERVASI**

Keuangan dan Akuntansi.

1. Bagaimana kondisi keuangan perusahaan?
2. Bagaimana sistem pembukuan perusahaan?
3. Kapan laporan keuangan dibuat?
4. Siapakah yang menyusun laporan keuangan?
5. Dari mana saja modal perusahaan diperoleh?
6. Berapakah besarnya aktiva, hutang dan modal perusahaan per 31 Desember 1995 dan 1996 (sebelum krisis) serta 1998 dan 1999 (saat krisis)?
7. Berapakah besarnya laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 1995 dan 1996 (sebelum krisis) serta 1998 dan 1999 (saat krisis)?

Lampiran 3:**PEDOMAN OBSERVASI DOKUMEN**

Melakukan pengumpulan data-data keuangan perusahaan yang berupa:

1. Neraca per 31 Desember 1995, 1996, 1998, 1999 seperti:
 - a. Jumlah aktiva lancar, aktiva tetap dan total aktiva perusahaan tahun 1995, 1996, 1998, 1999.
 - b. Jumlah hutang jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dari tahun 1995, 1996, 1998, 1999.
 - c. Jumlah modal sendiri dan modal perusahaan tahun 1995, 1996, 1998, 1999.
2. Laporan Rugi Laba perusahaan tahun 1995, 1996, 1998, 1999 seperti:
 - a. Jumlah pendapatan perusahaan baik pendapatan usaha maupun diluar usaha perusahaan tahun 1995, 1996, 1998, 1999.
 - b. Jumlah pengeluaran perusahaan pada tahun 1995, 1996, 1998, 1999.
 - c. Jumlah laba yang diperoleh perusahaan baik sebelum maupun sesudah pajak dari tahun 1995, 1996, 1998, 1999.

Akta Notaris
PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II
Cabang Palembang

Mengingat:

1. Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 3 tahun 1992 tanggal 1 Desember 1992 tentang pendirian PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1184/KMK.016/1992 tanggal 10 Nopember 1992 dan Nomor 3/KMK.016/1995 tanggal 3 Januari 1995 serta Nomor 47/KMK.016/1995 tanggal 12 Januari 1995 tentang pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.194/KP.006/Phb-85 tanggal 17 Oktober 1985 tentang pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Perhubungan yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Instansi Induk;
4. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.79 tahun 1993 tanggal 22 September 1993 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Kepegawaian Perusahaan Perseroan (Persero) di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor HK.56/2/16/PII-96 tanggal 17 Juni 1996 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.195/M/BW/PK/96 tanggal 17 Juni 1996.

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
Pasal 3

Menimbang :

- Bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka, perlu dilandasi dengan sarana sistem penilaian kesehatan BUMN yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
- bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali sistem penilaian kinerja BUMN yang dapat mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan memperhatikan kaedah penilaian kesehatan perusahaan yang berlaku umum;
- bahwa perubahannya tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 9 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (BN No. 1776 hal. 9A-10A) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (BN No. 5686 hal. 1B-21B) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 (BN No. 6121 hal. 4B-10B) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 (BN No. 6118 hal. 15B-18B) tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
- Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
- Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- Penilaian tingkat kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri.
- BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada Lampiran I.
- BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

- Tingkat kesehatan BUMN dibedakan menjadi :

- SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total skor BUMN lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS < = 95$
 - A apabila $65 < TS < = 80$
- KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS < = 65$
 - BB apabila $40 < TS < = 50$
 - B apabila $30 < TS < = 40$
- TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS < = 30$
 - CC apabila $10 < TS < = 20$
 - C apabila $TS < = 10$

- Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
 - Aspek Keuangan.
 - Aspek Operasional.
 - Aspek Administrasi.
- Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.

BAB III

BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN
Pasal 4

- Penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.
- Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

Pasal 5

- BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
 - Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara
 - Bendungan dan irigasi.
- Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.
- BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6...

Pasal 6

Indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi BUMN yang bergerak dibidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV

BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perhankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilai tingkat kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN tahun buku 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Maret 1998
 MENTERI KEUANGAN,
 ttd.
 FUAD BAWAZIER

LAMPIRAN I :

TABEL KELOMPOK BUMN
 INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR

NO.	BUMN INFRASTRUKTUR	NO.	BUMN NON INFRASTRUKTUR
1.	ANGKASA PURA I, PT	1.	ADHI KARYA, PT
2.	ANGKASA PURA II, PT	2.	AMARTA KARYA, PT
3.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN, PT	3.	BALAI PUSTAKA, PT
4.	DAMRI, PERUM	4.	BARATA INDONESIA, PT
5.	JASA MARGA, PT	5.	BATAN TEKNOLOGI, PT
6.	JASA TIRTA, PERUM	6.	BHANDA GHARA REKSA, PT
7.	KERET API, PERUM	7.	BINA KARYA, PT
8.	OTORITA JATILUHUR, PERUM	8.	BIO FARMA, PT
9.	PPD, PERUM	9.	BIRO KLASIFIKASI IND., PT
10.	PEL. INDONESIA I, PT	10.	BOMA BISHA INDRRA, PT
11.	PEL. INDONESIA II, PT	11.	GRANTAS ABIPRAYA, PT
12.	PEL. INDONESIA III, PT	12.	CAMBRICS PRIMISSIMA, PT
13.	PEL. INDONESIA IV, PT	13.	CIPTA NIAGA, PT
14.	PERUMNAS, PERUM	14.	DAHANA, PT
15.	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA, PT	15.	DHARMA NIAGA, PT
16.	PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, PERUM	16.	DJAKARTA LLOYD, PT
		17.	DOK DAN PERKAPALAN KUDA BAJIARI, PT
		18.	DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA, PT
		19.	GARAM, PT
		20.	GARUDA INDONESIA, PT
		21.	HOTEL INDONESIA INTERNA TIONAL, PT
		22.	HUTAMA KARYA, PT
		23.	INDAH KARYA, PT
		24.	INDOPARMA, PT
		25.	INDRA KARYA, PT
		26.	INDUSTRI GELAS, PT
		27.	INDUSTRI KAPAS INDONESIA, PT
		28.	INDUSTRI KERETA API, PT

NO.	BUMN INFRASTRUKTUR	NO.	BUMN NON INFRASTRUKTUR
29.		29.	INDUSTRI PESAMAT TELUK NUSANTARA, PT
30.		30.	INDUSTRI SANDANG, PT
31.		31.	INDUSTRI SANDANG, PT
32.		32.	INDUSTRI SODA INDONESIA, PT
33.		33.	INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT
34.		34.	INHUTANI I, PT
35.		35.	INHUTANI II, PT
36.		36.	INHUTANI III, PT
37.		37.	INHUTANI IV, PT
38.		38.	INHUTANI V, PT
39.		39.	ISTAKA KARYA, PT
40.		40.	JAKARTA INDUSTRIAL PULOGADUNG, PT
41.		41.	KAWASAN BERIKAT MUSAN TARA, PT
42.		42.	KAWASAN INDUSTRI CILAKA, PT
43.		43.	KAWASAN INDUSTRI MALANG, PT
44.		44.	KAWASAN INDUSTRI MEDAN, PT
45.		45.	KERTAS KRAFT ACEH, PT
46.		46.	KERTAS LECES, PT
47.		47.	KERTAS PADALARANG, PT
48.		48.	KIMIA FARMA, PT
49.		49.	KLIRING DAN JAMINAN KOMODITI, PT
50.		50.	KONEHA, PT
51.		51.	KRAKATAU STEEL, PT
52.		52.	LEN INDUSTRI, PT
53.		53.	MEGA ELTRA, PT
54.		54.	MERPATI NUSANTARA AIR WAYS, PT
55.		55.	NATOUR, PT
56.		56.	NINDYA KARYA, PT
57.		57.	PAL INDONESIA, PT
58.		58.	PRASADA PAMUNAH LINGGAR, PT
59.		59.	PDI PULAU BATAN, PT
60.		60.	PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, PT
61.		61.	PELNI, PT
62.		62.	PEMBANGUNAN PERUMNAS BALI, PT
63.		63.	PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI, PT
64.		64.	PENGERUKAN INDONESIA, PT
65.		65.	PERCETAKAN NEGARA, PT
66.		66.	PERIKAMAN NUSANTARA, PT
67.		67.	PERKEBUNAN NUSANTARA I, PT
68.		68.	PERKEBUNAN NUSANTARA II, PT
69.		69.	PERKEBUNAN NUSANTARA III, PT
70.		70.	PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT
71.		71.	PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT
72.		72.	PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT
73.		73.	PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT
74.		74.	PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT
75.		75.	PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PT
76.		76.	PERKEBUNAN NUSANTARA X, PT
77.		77.	PERKEBUNAN NUSANTARA XI, PT
78.		78.	PERKEBUNAN NUSANTARA XII, PT
79.		79.	PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, PT
80.		80.	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT
81.		81.	PERURI, PERUM
82.		82.	PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT
83.		83.	PERHUTANI, PERUM
84.		84.	PERHOTELAN DAN PERDIAN INDONESIA, PT
85.		85.	PERTANI, PT
86.		86.	PINDAD, PT
87.		87.	POS INDONESIA, PT
88.		88.	PRADNYA PARAMITA, PT
89.		89.	PRODUKSI FILM NEGARA, PT
90.		90.	PUPUK SRIWIDJAJA, PT
91.		91.	RAJAWALI NUSANTARA, PT
92.		92.	REKREASI NUSANTARA, PT
93.		93.	SANG HYANG SRI, PT
94.		94.	SARANA KARYA, PT
95.		95.	SARINAH, PT
96.		96.	SEMIN BATURAJA, PT
97.		97.	SEMIN KUPANG, PT
98.		98.	SERUPINDO, PT
99.		99.	SERABAYA INDUSTRIAL PANGREK, PT
100.		100.	SURVEY UDARA, PT
101.		101.	SURVEYOR INDONESIA, PT
102.		102.	TAMBANG BATUBARA BULU ATAM, PT
103.		103.	TAN HOROBUDUR, PRABAN DAN RATU BOKO, PT
104.		104.	TIRAMA KARYA, PT
105.		105.	TIRTA KARYA, PT
106.		106.	TIRTA KARYA, PT
107.		107.	TIRTA KARYA, PT
108.		108.	TIRTA KARYA, PT
109.		109.	TIRTA KARYA, PT
110.		110.	TIRTA KARYA, PT

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

PP = X (hari)	Perbaikan = X (hari)	S k o r	
		Infra	Non Infra
X <= 60	X >= 35	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0,8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4

- Perbaikan Collection Periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 1,2

- Perbaikan Collection Periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha Dalam tahun buku yang

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = X (hari)	Perbaikan (hari)	S k o r	
		Infra	Non Infra
X <= 60	35 < X	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0,8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 diatas.

Contoh Perhitungan

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3

- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2

- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Aset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.

- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksana.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total aset

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	S k o r	
		Infra	Non Infra
120 < X	20 < X	4	5
105 < X <= 120	15 < X <= 20	3,5	4,5
90 < X <= 105	10 < X <= 15	3	4
75 < X <= 90	5 < X <= 10	2,5	3,5
60 < X <= 75	0 < X <= 5	2	3
40 < X <= 60	X <= 0	1,5	2,5
20 < X <= 40	X <= 0	1	2
X <= 20	X <= 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Aset sebesar 70% dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.

Sesuai tabel 8 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Aset : 1,5

- Perbaikan Perputaran Total Aset (10%) : 2,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 2,5

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Aset 10% dan pada tahun 1998 sebesar 9%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Aset : 1,5

- Perbaikan Perputaran Total Aset (10%) : 2,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 2,5

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS) terhadap Total Asset

Rumus

$$TMS \text{ thd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.

- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = X	S k o r	
	Infra	Non Infra
0 <= X <= 0	0	0
10 <= X <= 10	1	4
20 <= X <= 20	2	6
30 <= X <= 30	3	7,25
40 <= X <= 40	4	10
50 <= X <= 50	5	9
60 <= X <= 60	6	7,5
70 <= X <= 70	7	8
80 <= X <= 80	8	7,5
90 <= X <= 90	9	8
90 <= X <= 100	9	6,5

Contoh perhitungan

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35%. maka sesuai tabel skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 3



**PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II
CABANG PALEMBANG**



SUCOFINDO INTERNATIONAL
CERTIFICATION SERVICES
ISO 9002 / SNI 19-9002
ORGANIZATION NO. Q SC 00136

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Istanto Yuli Prabowo**
Jabatan : **Manager Keuangan**
Alamat : **Jl. Belinyu No.1 Palembang**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Ok. Fredy Jarwanto**
No. Mhs : **962114087**
Jurusan : **Akuntansi**
Universitas: **Sanata Dharma Yogyakarta**

Telah melakukan Penelitian dengan judul "ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL PERUSAHAAN SEBELUM DAN DI SAAT KRISIS EKONOMI" di PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 20 Desember 2001
Hormat kami,
Cabang Pelabuhan Palembang
AN Manager Keuangan
SPV Perbendaharaan



Istanto Yuli Prabowo
NIP. 259074169

Jl. Belinyu No. 1 Palembang 30115
Telepon 0711 - 710611 (10 Saluran) Fax. (0711) 711758
Telex 27145 PC PLG IA

